

**PREFERENSI PETANI PADI TERHADAP KEBIJAKAN PERTANIAN DI
DESA MALASAN, KECAMATAN DURENAN, KABUPATEN
TRENGGALEK, JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh
INA QUEEN DIA AYU SARI



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
MALANG**

2018

**PREFERENSI PETANI PADI TERHADAP KEBIJAKAN PERTANIAN DI
DESA MALASAN, KECAMATAN DURENAN, KABUPATEN
TRENGGALEK, JAWA TIMUR**

Oleh

INA QUEEN DIA AYU SARI

145040107111071

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Pertanian Strata Satu (S-1)**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
MALANG**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Preferensi Petani Padi Terhadap Kebijakan Pertanian di
Desa Malasan, Kecamatan Durenan, Kabupaten
Trenggalek, Jawa Timur
Nama : Ina Queen Dia Ayu Sari
NIM : 145040107111071
Program Studi : Agribisnis
Minat : Sosial Ekonomi Pertanian

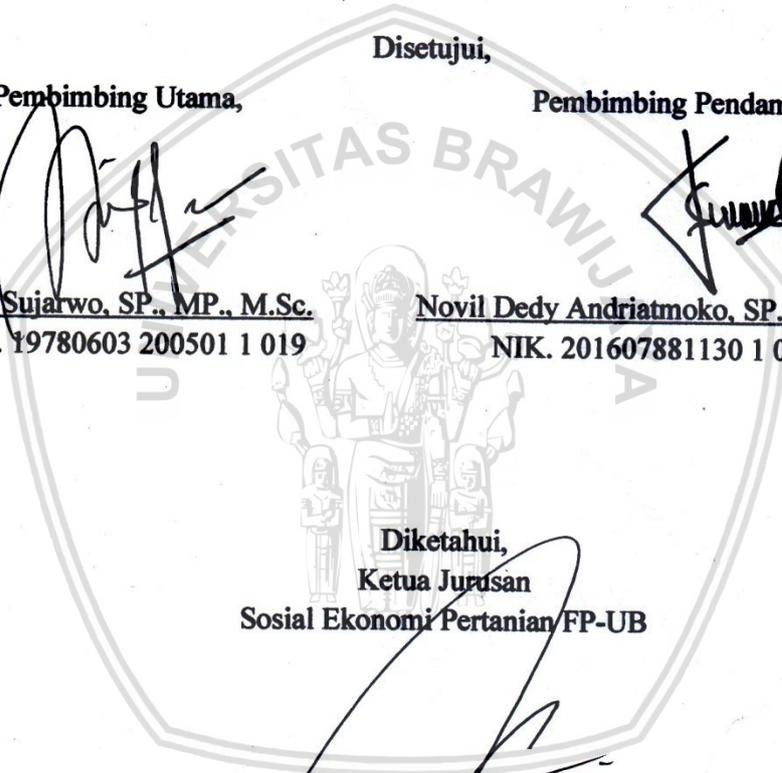
Disetujui,

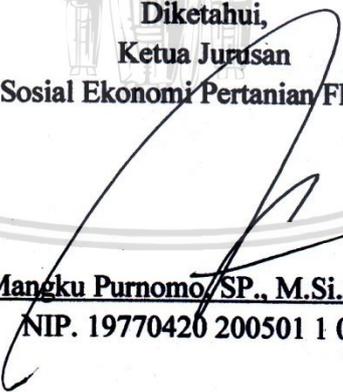
Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Sujarwo, SP., MP., M.Sc.
NIP. 19780603 200501 1 019


Novil Dedy Andriatmoko, SP., MP., M.BA
NIK. 201607881130 1 001


Diketahui,
Ketua Jurusan
Sosial Ekonomi Pertanian FP-UB


Mangku Purnomo/SP., M.Si., Ph.D
NIP. 19770420 200501 1 001

Tanggal Persetujuan :



LEMBAR PENGESAHAN

Mengesahkan

MAJELIS PENGUJI

Disetujui,

Penguji I

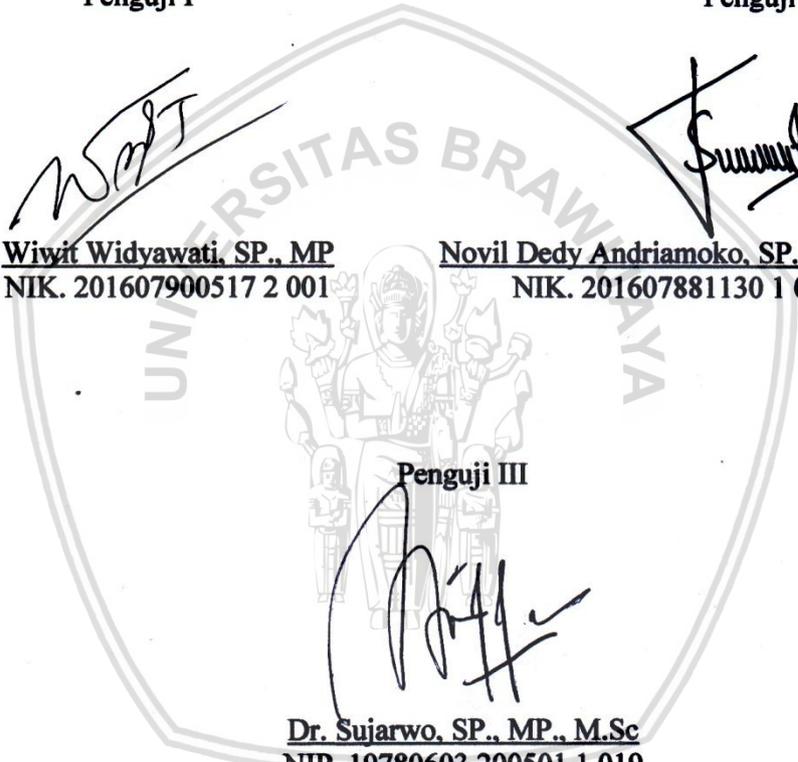
Penguji II



Wiwit Widyawati, SP., MP
NIK. 201607900517 2 001



Novil Dedy Andriamoko, SP., MP., M.BA
NIK. 201607881130 1 001



Penguji III



Dr. Sujarwo, SP., MP., M.Sc
NIP. 19780603 200501 1 019

Tanggal Lulus :



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Preferensi Petani Padi Terhadap Kebijakan Pertanian di Desa Malasan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur merupakan hasil penelitian saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing. Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali dengan jelas saya tunjukkan rujukannya dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, Mei 2018

Ina Queen Dia Ayu Sari



RINGKASAN

Ina Queen Dia Ayu Sari. 145040107111071. Preferensi Petani Padi Terhadap Kebijakan Pertanian di Desa Malasan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dibawah bimbingan Dr. Sujarwo, SP.,MP., M.Sc. dan Novil Dedy Andriatmoko, SP.,MP.,M.BA.

Kebijakan pembangunan pertanian sangat penting dalam upaya memajukan pertanian dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik petani padi, mengidentifikasi dan menganalisis preferensi petani terhadap kebijakan pertanian, dan mengetahui kombinasi kebijakan pertanian yang paling diinginkan oleh petani. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis konjoin dengan bantuan *software* SPSS. Peneliti menggunakan 3 aspek kebijakan pertanian untuk mengetahui preferensi petani padi terhadap kebijakan pertanian. Aspek kebijakan tersebut yaitu aspek teknis produksi, aspek ekonomi produksi, dan aspek kelembagaan petani. Pada aspek teknis produksi meliputi kebijakan pembangunan irigasi, perbaikan teknik usahatani melalui demoplot, dan perbaikan teknik usahatani melalui penyuluhan. Aspek ekonomi produksi meliputi bantuan kredit usahatani, kebijakan harga pupuk, dan kebijakan harga hasil pertanian. Aspek kelembagaan petani meliputi penguatan kelembagaan petani, pengembangan pertanian kawasan, dan pengembangan koperasi tani.

Penelitian ini dilakukan selama bulan September 2017-Januari 2018. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* di Desa Malasan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Kawasan ini juga merupakan sentra padi terbesar di wilayah Kabupaten Trenggalek. Teknik penentuan responden yang digunakan yaitu *simple random sampling*. Responden yang digunakan adalah rumah tangga petani komoditas pangan tanaman padi pada musim tanam tahun 2017 sebanyak 50 responden. Karakteristik umum petani padi Desa Malasan mayoritas berjenis kelamin laki-laki sebesar 100% dengan dominan usia 51-62 tahun sebesar 52%, pendidikan terakhir paling banyak tamatan SMA sebesar 44%, dan luas lahan usahatani paling banyak 0,76-1 ha sebesar 26%.

Hasil analisis konjoin menunjukkan nilai kepentingan atribut kebijakan terpenting adalah aspek teknis produksi sebesar 37,45%, untuk urutan tingkat kepentingan kedua adalah aspek ekonomi petani sebesar 33,41%, sedangkan urutan terakhir yaitu aspek kelembagaan petani sebesar 29,14%. Petani padi Desa Malasan lebih menginginkan kebijakan pada aspek teknis produksi yaitu kebijakan perbaikan teknik usahatani melalui penyuluhan. Aspek ekonomi produksi, petani lebih menginginkan kebijakan harga pupuk. Aspek kelembagaan petani ternyata petani lebih menginginkan kebijakan penguatan kelembagaan petani. Kombinasi kebijakan pertanian yang paling diinginkan petani padi di Desa Malasan yaitu kebijakan perbaikan teknik usahatani penyuluhan, kebijakan harga pupuk, dan kebijakan penguatan kelembagaan petani.

Kata Kunci: Kebijakan Pembangunan Pertanian, Preferensi Petani, Analisis Konjoin, Aspek Teknis Produksi, Aspek Ekonomi Produksi, Aspek Kelembagaan Petani.

SUMMARY

Ina Queen Dia Ayu Sari. 145040107111071. Preferences of Paddy Farmers to Agricultural Policy in Malasan Village, Durenan Sub District, Trenggalek Regency, East Java. Under the guidance of Dr. Sujarwo, SP.,MP., M.Sc. and Novil Dedy Andriatmoko, SP.,MP.,M.BA.

Agricultural development policy is very important in efforts to promote agriculture and can improve the welfare of farmers. This study aims to identify the characteristics of paddy farmers, identify and analyze farmers' preferences on agricultural policy, and know the combination of agricultural policies most desired by farmers. Analyzer used in research that is konjoin analysis with help of SPSS software. Researchers use 3 aspects of agricultural policy to know the preferences of paddyfarmers to agricultural policy. Aspects of the policy are technical aspects of production, aspects of production economy, and institutional aspects of farmers. The technical aspects of production include the policy of irrigation development, improvement of farming techniques through demoplot, and improvement of farming techniques through counseling. The economic aspects of production include farm credit support, fertilizer price policy, and agricultural pricing policy. Institutional aspects of farmers include strengthening of farmer institutions, development of agricultural areas, and development of farm cooperatives.

This research was conducted during September 2017-January 2018. The research location was determined purposively in Malasan Village, Durenan Sub-district, Trenggalek Regency because majority of the population work as farmers. This area is also the largest paddy center in the district of Trenggalek. The technique of determining the respondents used is simple random sampling. Respondents used are households of paddy crops food commodities in the planting season of 2017 as many as 50 respondents. General characteristics of paddy farmer Malasan Village majority male gender equal to 100% with dominant age 51-62 year equal to 52%, last education most of high school graduate 44%, and farming land area 0,76-1 ha equal to 26%.

The result of conjoint analysis shows that the importance of the most important policy attribute is the technical aspect of production of 37.45%, for the second order of importance is the economic aspect of farmers of 33.41%, while the last order is the institutional aspect of farmers of 29.14%. Paddy farmers of Malasan Village prefer the policy on the technical aspects of production that is the improvement of farming techniques through counseling. Economic aspect of production, farmers prefer fertilizer price policy. The institutional aspect of farmers turns out that farmers prefer the policy of institutional strengthening of farmers. The combination of agriculture policy most wanted by paddy farmers in Malasan Village is technical improvement of extension farming policy, fertilizer price policy, and policy of institutional strengthening of farmers.

Keywords: Agricultural Development Policy, Farmer Preference, Conjoint Analysis, Production Technical Aspect, Production Economy Aspect, Institutional Aspect of Farmers.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan judul “Preferensi Petani Padi Terhadap Kebijakan Pertanian di Desa Malasan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur” dengan lancar. Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai persyaratan bagimahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya Malang dalam menyelesaikan studi S1.

Dalam penelitian ini menganalisis preferensi petani padi terhadap kebijakan pertanian dengan menggunakan alat analisis konjoin. Untuk membantu mempermudah analisis data, diperlukan bantuan software SPSS versi 25. Hasil yang didapat berupa kebijakan yang paling diinginkan oleh petani padi dan kombinasi kebijakan yang paling diinginkan oleh petani padi.

Penulis menyadari dalam penyusunanskripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi semakin sempurnanya skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat dipahami dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Malang, Mei 2018

Ina Queen Dia Ayu Sari

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membimbing, membantu dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan selama penyusunan skripsi di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, terutama kepada:

1. Kedua orang tua yaitu ayah Drs. Sukadi dan mama Ernik Indah Yatin yang telah membesarkan dan merawat penulis dengan penuh kasih sayang serta menjadi sumber motivasi paling besar untuk penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sujarwo, SP.,MP., M.Sc. selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan saran dan kritik atas penyusunan skripsi.
3. Bapak Novil Dedy Andriatmoko, SP.,MP.,M.BA. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan saran dan kritik atas penyusunan skripsi.
4. Ibu Wiwit Widyawati, SP., MP. selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak saran dan masukan sehingga sangat bermanfaat dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Suparni selaku Mantri di Kecamatan Durenan dan Bapak Suwito selaku PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) di Desa Malasan yang membantu dalam memberikan informasi selama kegiatan penelitian berlangsung.
6. Bapak Kepala Desa Malasan, pegawai kantor Desa Malasan, dan seluruh petani padi di Desa Malasan selaku pihak yang telah memberikan arahan dan ilmunya selama kegiatan penelitian.
7. Kakak, adik, dan saudara yang telah memberikan semangat dan motivasi.
8. Teman-teman yang membantu dalam proses penulisan skripsi ini yaitu Colby Al Gaza, Anisa Ummu, Muhammad Nur Fauzan, Aida Tasya, Nadya Oktaviani, Ihsan Widi, Ivon Cladiya, Nabila Rahma, Muhammad Anandha, Muhammad Zulfikar, Ayu Sofie, Ari Sofia, Desty Fatma, Nurfatningtyas, Wanda Stevia, Putri Dewintha, Tamia Dwi, Sabila Nauliya, Aden Fitra, Ruth Hasiani.
9. Teman-teman yang selalu memberi semangat dan doa dalam penulisan skripsi ini yaitu Anang Yunus Rifa'i, Reynaldy Anthonio, Ade Putri, Sarah Muliawati, Araina Isnaini, Vennty Aulia, Reiza Novita, Ayunita Islamiah.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Malang pada tanggal 29 April 1996 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Orang tua penulis bernama Bapak Drs. Sukadi dan Ibu Ernik Indah Yatin. Penulis beragama Islam dan berkewarganegaraan sebagai Warga Negara Indonesia. Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN Blimbing 2 Kota Malang pada tahun 2002 sampai 2008. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMPN 8 Kota Malang pada tahun 2008 sampai 2011. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di Jurusan IPA SMAN 9 Kota Malang pada 2011 sampai 2014. Pada tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Strata-1 Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian melalui jalur SPMK.

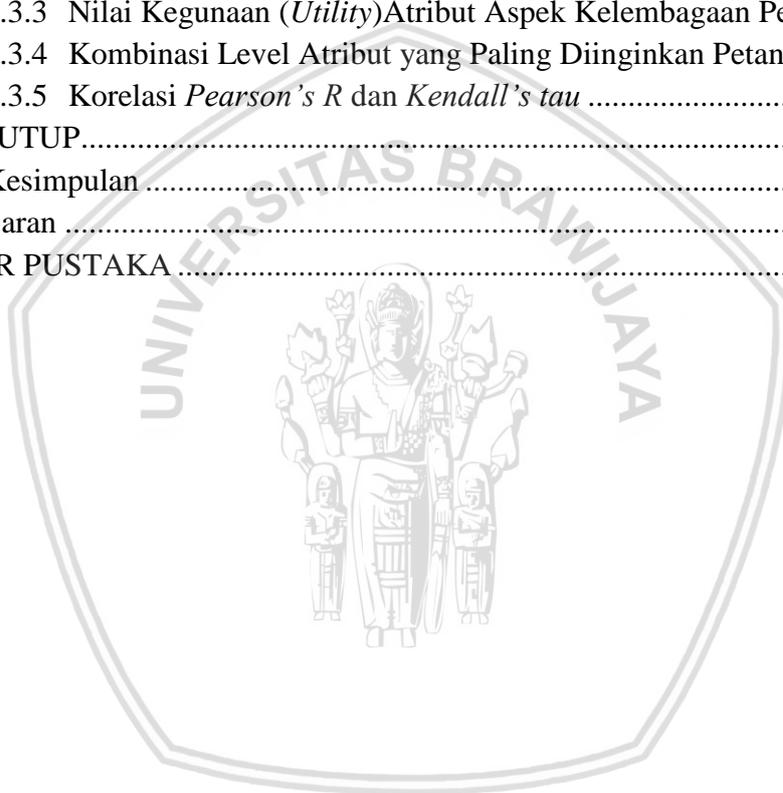


DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Telaah Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teori.....	9
2.2.1 Preferensi Petani.....	9
2.2.2 Kebijakan Pembangunan Pertanian.....	10
2.2.3 Analisis Opsi Kebijakan	11
2.2.4 Monitoring Implementasi Kebijakan.....	11
2.2.5 Evaluasi Dampak Kebijakan	11
2.2.6 Penyuluhan Kebijakan.....	12
2.2.7 Revitalisasi Pembangunan Pertanian.....	13
III. KERANGKA PEMIKIRAN	15
3.1 Kerangka Pemikiran.....	15
3.2 Hipotesis	18
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	18
3.3.1 Definisi Operasional.....	18
3.3.2 Pengukuran Variabel	20
IV. METODE PENELITIAN.....	21
4.1 Pendekatan Penelitian	21
4.2 Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian.....	21
4.3 Teknik Penentuan Sampel.....	21
4.4 Teknik Pengumpulan Data.....	23
4.5 Teknik Analisis Data.....	24
4.5.1 Analisis Deskriptif.....	24
4.5.2 Analisis Konjoin.....	24
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29



5.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
5.1.1	Keadaan Geografis dan Batas Administrasi	29
5.1.2	Jumlah Penduduk Desa Malasan	31
5.2	Karakteristik Petani.....	31
5.2.1	Jenis Kelamin Petani	31
5.2.2	Usia Petani.....	32
5.2.3	Tingkat Pendidikan Petani.....	33
5.2.4	Luas Lahan Usahatani	34
5.3	Preferensi Petani	35
5.3.1	Nilai Kegunaan (<i>Utility</i>)Atribut Aspek Teknis Produksi	39
5.3.2	Nilai Kegunaan (<i>Utility</i>)Atribut Aspek Ekonomi Produksi ..	43
5.3.3	Nilai Kegunaan (<i>Utility</i>)Atribut Aspek Kelembagaan Petani	47
5.3.4	Kombinasi Level Atribut yang Paling Diinginkan Petani	50
5.3.5	Korelasi <i>Pearson's R</i> dan <i>Kendall's tau</i>	51
VI.	PENUTUP.....	53
6.1	Kesimpulan	53
6.2	Saran	53
	DAFTAR PUSTAKA	54



DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Pengukuran Variabel.....	20
2.	Atribut dan taraf atribut kebijakan pertanian	26
3.	Batas Geografi	30
4.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Malasan.....	31
5.	Karakteristik Petani Berdasarkan Jenis Kelamin	31
6.	Karakteristik Petani Berdasarkan Usia	32
7.	Karakteristik Petani Berdasarkan Tingkat Pendidikan	33
8.	Karakteristik Petani Berdasarkan Luas Lahan	34
9.	Nilai Kegunaan (<i>Utility</i>) Atribut Aspek Teknis Produksi.....	39
10.	Nilai Kegunaan (<i>Utility</i>) Atribut Aspek Ekonomi Produksi.....	43
11.	Nilai Kegunaan (<i>Utility</i>) Atribut Aspek Kelembagaan Petani.....	47
12.	Korelasi <i>Pearson's R</i> dan <i>Kendall's tau</i>	51



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1.	Skema Kerangka Pemikiran Preferensi Petani Padi Terhadap Kebijakan	17
2.	Peta Wilayah Desa Malasan.....	30
3.	Rata-rata Nilai Kepentingan Atribut Kebijakan.....	36
4.	Nilai Kegunaan (<i>Utility</i>) Atribut Aspek Teknis Produksi.....	43
5.	Nilai Kegunaan (<i>Utility</i>) Atribut Aspek Ekonomi Produksi.....	47
6.	Nilai Kegunaan (<i>Utility</i>) Atribut Aspek Kelembagaan Petani.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
1.	Perhitungan Sampel Responden.....	59
2.	Kombinasi Preferensi Petani.....	61
3.	Hasil Perhitungan Kombinasi Atribut.....	62
4.	SPSS Syntax Konjoin	63
5.	Hasil Utilitas Preferensi Petani	64
6.	Kuisisioner Preferensi Kebijakan Pertanian	65
7.	Dokumentasi	66



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan lingkungan (Todaro dan Smith, 2014). Untuk merealisasikan peran strategis tersebut, maka diperlukan dukungan kebijakan pertanian yang baik dan tepat agar dapat mewujudkan pertanian berkelanjutan yang meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani (Kementan, 2013).

Usahatani komoditas tanaman padi mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pencapaian ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan pertanian di Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Pembangunan pertanian saat ini diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Usahatani padi menyediakan lapangan pekerjaan dan sebagai sumber pendapatan sekitar 21 juta rumah tangga pertanian. Komoditas padi menjadi tolok ukur ketersediaan pangan bagi Indonesia karena bahan makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia adalah beras. Namun, upaya peningkatan produksi padi nasional dihadapkan pada kendala keterbatasan modal petani, penguasaan lahan pertanian yang sempit, serta sarana produksi semakin mahal. Terdapat tiga jenis sumber daya utama yang dapat menentukan produktivitas dan produksi pertanian yaitu lahan, tenaga kerja, dan modal (Harianto, 2010). Hal ini menyebabkan petani tidak mampu menerapkan teknologi maju sehingga produktivitas masih belum maksimal.

Kebijakan pertanian diartikan sebagai upaya pemerintah melalui berbagai peraturan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi komoditas pertanian (Ragasa, 2011). Kebijakan pembangunan pertanian sangat penting dalam upaya memajukan pertanian dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 visi dari pembangunan pertanian Indonesia adalah terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai

tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani. Adapun sarasannya yaitu mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan berbasis sumber daya lokal, meningkatkan swasembada berkelanjutan, menumbuhkan dan mengembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan ekspor produk pertanian, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani (Kementan, 2009).

Tidak mengherankan jika pemerintah Indonesia mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani. Berbagai kebijakan telah ditempuh untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani dalam teknis produksi, ekonomi produksi, kelembagaan pertanian, pasar, kemitraan, dan kelestarian lingkungan. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kemudian diimplementasikan untuk kemudahan pembangunan pertanian di lapangan. Implikasi kebijakan dapat mewujudkan target yang ditetapkan dalam revitalisasi pembangunan pertanian seperti penyediaan modal di sektor pertanian, penyediaan lahan pertanian, sarana dan prasarana pertanian, pembiayaan pertanian yang murah dan mudah diakses petani, penciptaan inovasi teknologi, penguatan kelembagaan petani, serta peningkatan penyuluhan pertanian. Diperlukan upaya untuk menjalin kemitraan strategis antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat pertanian guna meningkatkan kapasitas produksi padi secara berkelanjutan.

Monitoring implementasi kebijakan pertanian diperlukan agar kebijakan yang selama ini telah diterapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Evaluasi kebijakan pertanian berdasarkan preferensi petani padi di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek ini berguna dalam rangka memperbaiki paket kebijakan yang ada selama ini untuk lebih berhasil guna dan berdaya guna. Petani identik dengan produsen utama sebagai penghasil produk, namun petani merupakan salah satu konsumen utama dalam implementasi kebijakan pertanian yang diberikan oleh pemerintah. Preferensi petani sebagai konsumen sangat diperlukan demi peningkatan kualitas kebijakan yang telah diterapkan.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Kawasan ini juga

merupakan sentra padi terbesar di wilayah Kabupaten Trenggalek. Produktifitas padi di Kecamatan Durenan dari tahun 2012 sampai 2016 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2012 produktifitasnya sebesar 6,43 ton/ha, tahun 2013 sebesar 6,63ton/ha, tahun 2014 dan 2015 sebesar 6,18ton/ha, serta pada tahun 2016 sebesar 6,18ton/ha (BPS, 2017). Rata-rata produktifitas padi di Kecamatan Durenan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini sebesar 6,32 ton/hayang berarti bahwa produktifitas padi menurun. Berdasarkan trend produktifitas yang menurun tersebut, ternyata sistem pola tanam padi di Kecamatan Durenan kurang berjalan dengan serempak. Pada musim tanam September 2015 dan Januari 2016, sebagian petani tidak menanam padi melainkan menanam tanaman palawija. Perbedaan waktu musim tanam untuk pergantian tanaman dari padi menjadi palawija ini membuat petani bingung menentukan kapan waktu yang tepat. Sehingga petani menginginkan kebijakan pertanian yang dapat membantu petani dalam mencari solusi yang berkelanjutan dan dapat memperbaiki usahatani padi dengan maksimal. Adanya kebijakan pertanian yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan petani padi dapat meningkatkan produktifitas padi. Preferensi petani terhadap kebijakan pertanian mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kelanjutan kebijakan pertanian ke depannya. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi petani padi terhadap kebijakan pertanian dan kombinasi kebijakan pertanian yang paling diinginkan. Hal ini berguna untuk mengevaluasi kebijakan pertanian yang telah diterapkan dapat dilanjutkan atau dilakukan pembaharuan kebijakan yang lebih efektif ke depannya.

1.2 Rumusan Masalah

Pada dasarnya untuk mencapai pembangunan pertanian yang berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan peran pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan adanya berbagai kebijakan pertanian yang telah diterapkan dan sedang dijalankan saat ini. Kebijakan pertanian menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani merupakan sasaran akhir yang akan dicapai dari pembangunan pertanian. Hal ini didasarkan pada fakta yang ada bahwa petani merupakan pelaku utama dalam pembangunan

pertanian, sudah seharusnya mendapatkan hak yang sepadan dengan curahan waktu, tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk bekerja di bidang pertanian. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam membangun pertanian merupakan sarana bagi para pengambil kebijakan di bidang pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani (Renstra, 2015).

Petani identik dengan produsen utama sebagai penghasil produk. Namun petani merupakan salah satu konsumen utama dalam implementasi kebijakan pertanian yang diberikan oleh pemerintah. Preferensi petani sebagai konsumen sangat diperlukan demi peningkatan kualitas kebijakan yang telah diterapkan. Preferensi petani sangat penting karena petani sebagai pelaku utama usaha pertanian. Kebijakan pertanian dapat diibaratkan menjadi suatu produk yang diinginkan oleh petani yang berperan sebagai konsumen.

Banyak permasalahan yang timbul bagi petani tentang kebijakan pertanian saat ini. Petani tidak merasakan kebijakan pertanian yang telah diterapkan. Adanya permainan dari pihak penyalur atau tidak sesuainya kebijakan pertanian yang telah dilaksanakan menjadi pemicu kebijakan tidak diterima baik oleh petani. Untuk itu diperlukan preferensi petani tentang kebijakan pertanian yang selama ini telah diterapkan agar kebijakan pertanian dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan oleh kebutuhan petani.

Pada kenyataannya petani mempunyai perbedaan preferensi terhadap kebijakan pertanian yang lebih diinginkan. Keadaan sosial ekonomi juga dapat mempengaruhi keputusan petani (Bekele, 2007). Petani dengan pendidikan yang lebih tinggi akan memilih kebijakan yang bermanfaat secara jangka panjang, sedangkan petani dengan pendidikan rendah cenderung memilih kebijakan yang bermanfaat secara jangka pendek. Kebijakan yang lebih dipilih oleh sebagian besar petani adalah kebijakan yang menguntungkan dari segi ekonomi dan hasil produksinya (Orazem, *et al* 1988). Penelitian ini merupakan salah satu cara yang dapat membantu mengetahui kebijakan pertanian yang diinginkan oleh petani padi di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik petani padi di Desa Malasan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur?
2. Bagaimana preferensi petani padi terhadap kebijakan pertanian yang telah diterapkan saat ini?
3. Bagaimana kombinasi kebijakan pertanian yang paling diinginkan oleh petani padi?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yaitu batas untuk memfokuskan ruang lingkup penelitian. Selain itu, batasan masalah berfungsi sebagai lingkup mencapai tujuan penelitian sehingga tidak keluar dari topik permasalahan. Berikut ini merupakan batasan masalah pada penelitian yaitu :

1. Penelitian ini hanya dilakukan di salah satu desa yang ada di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek.
2. Usahatani yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu usahatani padi.
3. Kebijakan pertanian usahatani padi yang dijadikan atribut adalah kebijakan aspek teknis produksi, aspek ekonomi produksi, dan aspek kelembagaan petani.
4. Penelitian ini difokuskan pada preferensi petani padi mengenai kebijakan pertanian yang telah diterapkan oleh pemerintah.

1.4 Tujuan Penelitian

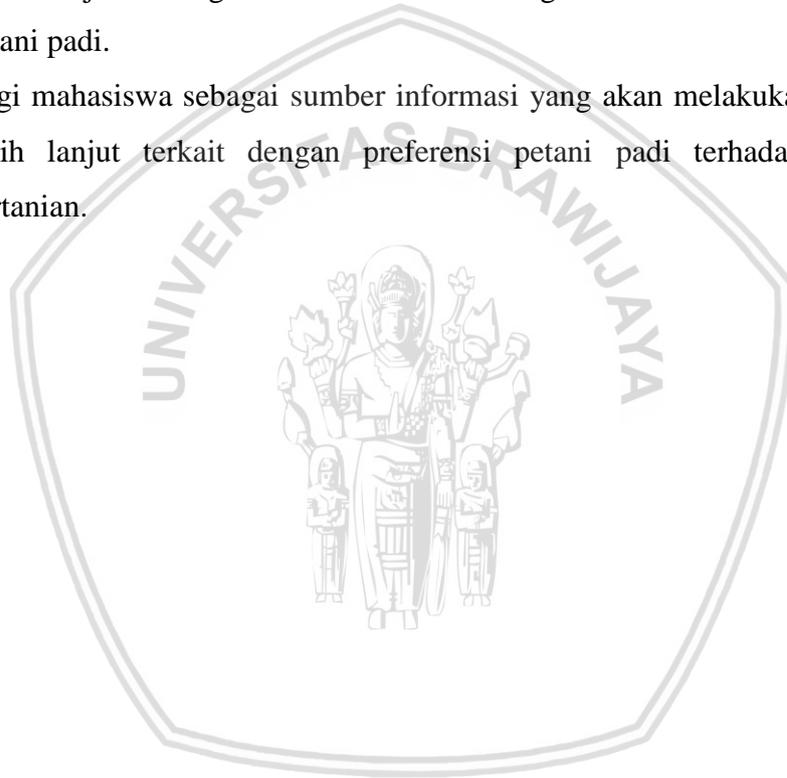
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui karakteristik petani padi di Desa Malasan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis preferensi petani padi terhadap kebijakan pertanian.
3. Mengetahui kombinasi kebijakan pertanian yang paling diinginkan oleh petani padi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pertanian yang tepat berdasarkan kebutuhan dan keinginan petani padi.
2. Bagi penyuluh pertanian yang berada di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kabupaten Trenggalek, sebagai bahan acuan komunikasi pada kegiatan penyuluhan yang akan berlangsung. Sehingga tujuan kebijakan pertanian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan petani padi.
3. Bagi mahasiswa sebagai sumber informasi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan preferensi petani padi terhadap kebijakan pertanian.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan proses telaah pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menjadikan penelitian sebelumnya sebagai acuan maupun studi literatur sehingga peneliti dapat mengisi kekurangan dari penelitian sebelumnya. Peneliti mengambil beberapa penelitian yang berkaitan dengan preferensi petani terhadap kebijakan pertanian. Penelitian telaah terdahulu ini mencakup nama peneliti, tahun, judul, tujuan penelitian, metode yang digunakan, serta hasil dari penelitian tersebut.

Pada penelitian Orazem *et al.*, (1988) tentang analisis kebijakan data pendapat petani Iowa mengenai empat kebijakan pertanian: melanjutkan program saat ini yang menargetkan manfaat bagi petani secara fiskal, kontrol areal wajib, dan beralih ke pasar bebas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pendapat petani tentang kebijakan agribisnis. Metode yang digunakan yaitu dengan model pendekatan probit. Hasilnya menunjukkan bahwa situasi keuangan petani, ukuran dan jenis operasi, pendidikan, dan pengalaman petani secara signifikan mempengaruhi pendapatnya. Sikap terhadap kontrol dan penargetan wajib sangat sensitif, dan sikap terhadap kelanjutan program saat ini paling tidak peka terhadap perubahan karakteristik ekonomi. Pengaman yang kuat dari kedua dukungan dan oposisi ditemukan untuk setiap kebijakan kecuali program saat ini.

Sedangkan menurut hasil penelitian Simatupang dkk (2006) tentang dinamika produksi, masalah dan kendala, serta opsi kebijakan peningkatan produksi padi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai kendala produksi (*supply bottleneck*) dengan fokus analisis pada aspek masalah dan kendala, potensi dan prospek, dan kebijakan strategis untuk peningkatan kapasitas aktual produksi padi. Metode yang digunakan yaitu metode analisis tabulasi silang antar beberapa peubah dalam bentuk pertumbuhan (*trend*) untuk memahami permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan kapasitas actual. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus diorientasikan dari fokus kebijakan harga ke peningkatan kapasitas produksi, yakni: (a) rehabilitasi dan ekstensifikasi infrastruktur irigasi, (b) pembukaan lahan sawah baru, (c) memacu inovasi teknologi, termasuk

revitalisasi sistem penelitian dan pengembangan pertanian serta sistem diseminasi inovasi pertanian dengan deregulasi dan penciptaan iklim kondusif bagi investor swasta.

Berdasarkan hasil analisis kinerja kebijakan menurut Sudaryanto dan Rusastra (2006) tentang kebijakan strategis usahatani untuk peningkatan produksi serta pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan kebijakan strategi pengembangan agribisnis padi. Metode yang digunakan yaitu metode *time series*. Hasilnya menunjukkan bahwa pilihan kebijakan strategis yang dapat dipertimbangkan antara lain adalah: 1) peningkatan ketersediaan dan akses teknologi, permodalan, dan penyuluhan komoditas alternatif nonpadi, 2) pengembangan infrastruktur irigasi pompa, peningkatan produktivitas, dan program stabilisasi harga untuk komoditas alternatif bernilai ekonomi dan risiko tinggi, dan 3) pemberdayaan kelembagaan kelompok tani dan membangun keterkaitan fungsional dan institusional dengan elemen agribisnis lainnya dalam rangka mendorong peningkatan produksi, pendapatan petani, dan keberlanjutan diversifikasi usahatani.

Pada hasil penelitian Bekele (2007) menganalisis tentang preferensi petani untuk program intervensi pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui preferensi terhadap intervensi pembangunan. Metode yang digunakan yaitu metode *survey*. Hasilnya menunjukkan bahwa analisis logit multinomial preferensi petani untuk intervensi pembangunan dibagi menjadi empat kategori utama: pasar, irigasi, pemukiman kembali, dan konservasi tanah dan air. Pengakuan dan pemahaman akan faktor-faktor tersebut, yang mempengaruhi penerimaan akseptabilitas, peringkat subyektif, diskriminasi subyektif. Kebijakan pembangunan untuk penerapan tingkat mikro, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan perumusan kebijakan tingkat makro.

Penelitian Mittenzwei (2015) menganalisis tentang pengetahuan petani terhadap kebijakan pertanian melalui preferensi petani di Norway. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pengetahuan pertanian dalam hal pembentukan preferensi kebijakan pertanian. Metode yang digunakan adalah metode regresi. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan berbasis fakta tentang

pertanian tampaknya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan preferensi masyarakat untuk kebijakan pertanian di Norway.

Dari beberapa hasil penelitian terhadap preferensi petani dapat dilihat bahwa preferensi petani padi terhadap kebijakan pertanian sangat penting untuk peningkatan kesejahteraan petani. Pengukuran preferensi petani terhadap suatu kebijakan menggunakan model pengukuran yang dapat menganalisa hubungan antara pengetahuan petani terhadap kebijakan yang dipilihnya dengan sikap atas kebijakan tersebut sesuai dengan ciri maupun atribut yang ditampilkannya. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti tentang kebijakan pertanian yang telah diterapkan. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu belum ada penelitian yang mengkaji tentang preferensi petani padi terhadap kebijakan pertanian dengan menggunakan analisis konjoin. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengisi *Practical GAP* yaitu adanya perbedaan alat analisis penelitian. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis konjoin. Analisis konjoin digunakan untuk menganalisis preferensi petani terhadap kebijakan pertanian, sehingga diperoleh kombinasi atribut dari kebijakan pertanian yang lebih disukai oleh petani padi.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Preferensi Petani

Petani identik dengan produsen utama sebagai penghasil produk, namun petani merupakan salah satu konsumen utama dalam implementasi kebijakan pertanian yang diberikan oleh pemerintah. Preferensi petani sebagai konsumen sangat diperlukan demi peningkatan kualitas kebijakan yang telah diterapkan. Preferensi petani merupakan informasi yang sangat penting. Preferensi petani sangat penting karena petani sebagai pelaku utama usaha pertanian. Kebijakan pertanian dapat diibaratkan menjadi suatu produk yang diinginkan oleh petani yang berperan sebagai konsumen. Kegunaan preferensi konsumen terutama untuk menjelaskan satu pilihan yang memiliki nilai tertinggi dibanding dengan pilihan lainnya (Hinson dan Bruchhaus, 2008). Produk yang diinginkan dan disukai konsumen adalah produk yang dapat memenuhi dan memuaskan keinginan konsumen. Karakteristik kualitas suatu produk yang diinginkan oleh

konsumen dapat diperoleh melalui pengkajian terhadap perilaku konsumen berdasarkan pendekatan konsep atribut produk. Konsep atribut produk menganggap bahwa konsumen memandang suatu produk sebagai kesatuan dari atribut-atribut tertentu yang dikenal sebagai petunjuk kualitas (Schupp *et al.*, 2003). Petunjuk kualitas ini merupakan stimulus yang bersifat informatif bagi konsumen berhubungan dengan produk dan dapat diketahui oleh konsumen melalui panca indera. Melalui petunjuk kualitas ini, konsumen dapat menilai bahwa suatu produk mempunyai kualitas yang sesuai dengan preferensinya atau tidak.

2.2.2 Kebijakan Pembangunan Pertanian

Menurut Simatupang (2003) kebijakan pembangunan pertanian adalah keputusan dan tindakan pemerintah untuk mengarahkan, mendorong, mengendalikan, dan mengatur pembangunan pertanian guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan pertanian haruslah dipandang dalam konteks pembangunan nasional yang tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan petani saja tetapi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti, kebijakan pembangunan pertanian termasuk dalam kategori kebijakan publik, dilakukan oleh pemerintah dan berpengaruh terhadap kehidupan orang banyak.

Dalam perekonomian modern, seperti perekonomian Indonesia saat ini, keragaan sektor-sektor ekonomi saling mempengaruhi dan keragaan perekonomian dalam negeri sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian internasional. Berbagai kebijakan yang dibuat pada sektor nonpertanian berpengaruh nyata terhadap keragaan pembangunan pertanian, dan demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh, kebijakan perkreditan dan kurs mata uang yang merupakan kebijakan moneter jelas sangat berpengaruh terhadap keragaan pembangunan sektor pertanian. Kebijakan investasi yang merupakan kebijakan pembangunan sektor industri sangat berpengaruh terhadap keragaan sektor pertanian, sementara kebijakan harga pupuk merupakan kebijakan sektor pertanian yang jelas sangat berpengaruh terhadap keragaan industri pupuk yang berarti pula keragaan pembangunan sektor industri. Cakupan kebijakan

pembangunan pertanian tidak dapat dibatasi berdasarkan deliniasi sektoral maupun secara jenjang organisasi pemerintahan.

Dasar deliniasi yang lebih tepat dalam menentukan cakupan kebijakan pembangunan pertanian adalah pendekatan fungsional. Secara umum dapat dikatakan bahwa semua keputusan dan tindakan pemerintah yang secara fungsional berpengaruh nyata terhadap keragaan pembangunan pertanian termasuk dalam kategori kebijakan pembangunan pertanian. Cakupan kebijakan pembangunan pertanian sangatlah luas, yang dapat dikelompokkan ke dalam tujuh bidang atau “tujuh inti” pembangunan pertanian: inovasi, input, investasi dan modal kerja, insentif, infrastruktur, institusi dan industri.

2.2.3 Analisis Opsi Kebijakan

Menurut Simatupang (2003) tahapan analisis opsi kebijakan adalah tahapan untuk merumuskan dan mengevaluasi kelayakan opsi kebijakan. Langkah kunci pada tahapan ini adalah menetapkan tujuan, kendala dan kriteria keragaan yang menjadi acuan utama evaluasi opsi kebijakan. Secara umum, kriteria utama meliputi lima bidang yaitu: 1) Kelayakan teknis, 2) Kelayakan ekonomi, 3) Kelayakan sosial, 4) Kelayakan lingkungan, 5) Kelayakan administratif, 6) Kelayakan hukum, dan 7) Kelayakan politis. Sedangkan tahapan analisis opsi kebijakan dapat dibagi menjadi lima kegiatan yaitu: 1) Penetapan tujuan dan kendala, 2) Pemilihan kriteria evaluasi, 3) Spesifikasi opsi kebijakan, 4) Evaluasi perkiraan setiap opsi kebijakan, dan 5) Presentasi rekomendasi.

2.2.4 Monitoring Implementasi Kebijakan

Menurut Simatupang (2003) monitoring kebijakan adalah kegiatan untuk mengamati pelaksanaan operasional paket kebijakan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah paket kebijakan sungguh-sungguh dilaksanakan sesuai dengan rancangan hambatan yang dihadapi dan usulan untuk mengatasi hambatan tersebut. Monitoring implementasi berfungsi untuk mengatasi masalah manajemen dalam pelaksanaan paket kebijakan.

2.2.5 Evaluasi Dampak Kebijakan

Menurut Simatupang (2003) evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan termasuk bagian tugas dari Tim Analisis Kebijakan. Evaluasi dampak berguna

dalam rangka memperbaiki paket kebijakan sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna. Dengan demikian, keseluruhan tahapan analisis kebijakan mulai dari perolehan masalah hingga evaluasi pelaksanaan merupakan suatu kesatuan siklus tertutup yang dinamis. Disamping untuk perbaikan paket kebijakan, kegiatan evaluasi dampak juga berfungsi untuk menciptakan mekanisme pertanggungjawaban Tim Analisis. Untuk itu, Tim Analisis Kebijakan mestilah “bersifat transparan”, paling tidak dalam lingkungan internal terbatas. Tim Analisis Kebijakan akan menanggung malu apabila paket kebijakan yang diusulkannya mengalami kegagalan, namun akan merasa bangga atau memperoleh penghargaan bila paket kebijakan yang diusulkannya berhasil. Dengan begitu, Tim Analisis Kebijakan akan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam rangka mempertahankan reputasinya. Manfaat lain dari evaluasi dampak adalah untuk kemampuan dan pemahaman Tim Analisis mengenai masalah kebijakan. Pengalaman dalam melakukan kegiatan evaluasi dampak akan meningkatkan pengetahuan Tim Analisis mengenai faktor-faktor penyebab suatu kebijakan berhasil atau gagal, yang berarti juga meningkatkan kemampuan profesional Tim Analisis dalam melakukan tugas pokoknya. Kegiatan evaluasi atas kebijakan yang dirancang sendiri merupakan wahana pemberdayaan berkelanjutan bagi Tim Analisis Kebijakan.

2.2.6 Penyuluhan Kebijakan

Menurut Simatupang(2003) tugas pokok pegawai negeri dan instansi pemerintah adalah melayani kepentingan masyarakat banyak. Salah satu cara yang paling efektif untuk mewujudkan misi tersebut adalah memberdayakan masyarakat sehingga mereka mampu menetapkan keputusan terbaik untuk kepentingan masing-masing. Pendekatan pemberdayaan yang paling efektif adalah transparansi yaitu membuat sangat jelas dan dapat dipahami konsekuensi dari setiap kebijakan pemerintah(Lee, 1994). Dengan demikian, penyuluhan publik membuat kebijakan pemerintah menjadi transparan termasuk dalam lingkup tugas dari analisis kebijakan dan lembaga pemerintah. Seperti halnya pembuat kebijakan, masyarakat umumnya berhak untuk mengetahui dengan jelas terhadap semua konsekuensi kebijakan yang dibuat pemerintah. Untuk itu, analisis

kebijakan wajib melaksanakan penyuluhan atau penerangan kebijakan kepada masyarakat umum.

2.2.7 Revitalisasi Pembangunan Pertanian

Pada awal tahun 1970-an Hayami dan Ruttan (1985) mengeluarkan pemikiran yang disebut *Induced Innovation Model*. Pada model tersebut dijelaskan adanya keterkaitan antara empat faktor penggerak pembangunan pertanian, yaitu: 1) sumber daya alam, 2) sumber daya budaya, 3) teknologi, dan 4) kelembagaan. Krisnamurthi (2006) mengungkapkan pentingnya sejarah dalam konteks revitalisasi pertanian. Dikatakan bahwa sejarah menjadi penting bukan karena romantisme nostalgia atau mengagungkan kebanggaan prestasi, tetapi justru karena dapat menjadi cermin untuk mengenal jati diri dan untuk memperbaiki hari esok dalam lintasan sejarah itu sendiri. Lebih lanjut dikatakan bahwa cermin itu bukan untuk mencari kekurangan dan kesalahan, tetapi sebagai modal untuk melangkah ke depan secara lebih baik.

Revitalisasi pertanian memiliki tiga pilar pengertian, yaitu: 1) sebagai kesadaran akan pentingnya pertanian, 2) bentuk rumusan harapan masa depan akan kondisi pertanian yang lebih baik, serta 3) sebagai kebijakan dan strategi besar melakukan proses revitalisasi pertanian (Krisnamurthi, 2006). Peran revitalisasi pertanian tidak hanya sebatas membangun kesadaran pentingnya pertanian semata, tetapi juga terkait dengan adanya perubahan paradigma pola pikir masyarakat yang memandang pertanian tidak hanya sekedar bercocok tanam menghasilkan komoditas untuk dikonsumsi. Sektor pertanian mempunyai efek pengganda yang besar terkait dengan adanya keterkaitan ke depan dan ke belakang dengan sektor-sektor lainnya, terutama industri pengolahan dan jasa. Pada awal Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua (KIB 2), pemerintah menargetkan pencapaian swasembada berkelanjutan untuk beras dan jagung, dan pencapaian swasembada kedelai, gula, dan daging sapi pada tahun 2014 (Kementan, 2010).

Target pencapaian swasembadatersebut mengalami penyesuaian setelah mempelajari situasi lingkungan strategis yang berkembang. Untuk beras, dalam sidang kabinet terbatas di Bogor, tanggal 22 Februari 2011, Presiden Republik Indonesia mengubah sasaran swasembada beras berkelanjutan menjadi surplus

produksi beras 10 juta ton pada tahun 2014 (Harianto, 2013). Strategi pembangunan pertanian yang akan dan telah dilaksanakan Kementerian Pertanian selama periode 2010-2014 dilakukan melalui revitalisasi pertanian dengan fokus pada tujuh aspek dasar yang disebut dengan “Tujuh Gema Revitalisasi”, yang terdiri dari: 1) lahan, 2) perbenihan dan perbibitan, 3) infrastruktur dan sarana, 4) sumber daya manusia, 5) pembiayaan petani, 6) kelembagaan petani, dan 7) teknologi dan industri hilir (Kementan, 2010).



III. KERANGKA PEMIKIRAN

3.1 Kerangka Pemikiran

Kebijakan pembangunan pertanian sangat penting dalam upaya memajukan pertanian dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan pembangunan pertanian yang telah diterapkan saat ini belum berjalan secara efektif. Pilihan suka atau tidak suka seorang petani terhadap suatu kebijakan pertanian dapat diketahui melalui analisis preferensi petani. Analisis preferensi petani terhadap kebijakan pertanian dianggap perlu sebagai rekomendasi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pertanian yang sesuai dengan preferensi petani.

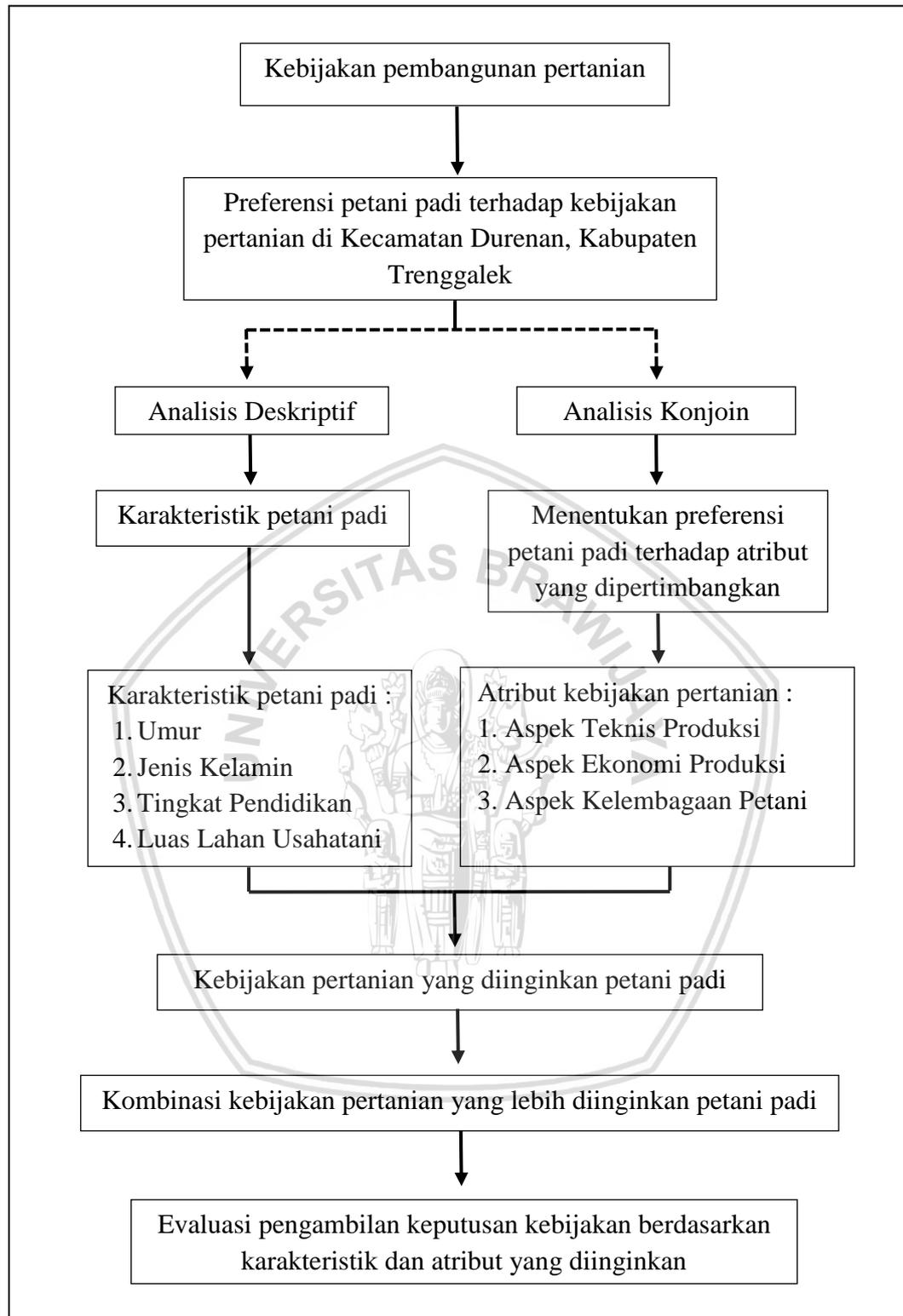
Preferensi petani dalam pengambilan kebijakan pertanian yang diinginkan juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik dari setiap petani. Karakteristik petani meliputi tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, dan luas lahan pertanian yang diusahakan (Orazem *et al.*, 1988). Keadaan sosial ekonomi petani akan mempengaruhi keputusan petani dalam memilih kebijakan pertanian yang diinginkan (Bekele, 2007).

Terdapat banyak aspek kebijakan pertanian yang ada saat ini. Namun, peneliti menggunakan 3 aspek kebijakan pertanian untuk mengetahui preferensi petani padi terhadap kebijakan pertanian. Aspek kebijakan tersebut antara lain yaitu aspek teknis produksi, aspek ekonomi produksi, dan aspek kelembagaan petani. Pada aspek teknis produksi, peneliti mengambil kebijakan pembangunan irigasi, perbaikan teknik usahatani melalui demoplot, dan perbaikan teknik usahatani melalui penyuluhan. Aspek ekonomi produksi, peneliti mengambil kebijakan meliputi bantuan kredit usahatani, kebijakan harga pupuk, dan kebijakan harga hasil pertanian. Aspek kelembagaan petani, peneliti mengambil kebijakan yang meliputi penguatan kelembagaan petani, pengembangan pertanian kawasan, dan pengembangan koperasi tani. Selain itu, karakteristik petani seperti tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, dan luas lahan usahatani juga dapat mempengaruhi pilihan yang diinginkan petani.

Pada kenyataannya petani mempunyai perbedaan preferensi terhadap kebijakan pertanian yang lebih diinginkan. Penelitian ini merupakan salah satu cara yang dapat membantu mengetahui kebijakan pertanian yang diinginkan oleh petani padi di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Lokasi ini dipilih

untuk mengetahui preferensi petani tentang kebijakan pertanian karena lokasi ini merupakan daerah sentra pertanian padi terbesar di Kabupaten Trenggalek. Melalui preferensi petani tersebut, pemerintah dapat mengetahui beberapa aspek yang lebih diinginkan petani sehingga akan tercapai kebijakan pembangunan pertanian yang berhasil guna dan berdaya guna. Pada penelitian ini juga menghasilkan kombinasi kebijakan pertanian yang paling diinginkan oleh petani berdasarkan preferensi petani. Selanjutnya pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan pembangunan pertanian untuk dilanjutkan atau dilakukan pembaharuan guna mencapai kebijakan yang sesuai dengan harapan. Adapun skema kerangka pemikiran penelitian ditunjukkan secara rinci pada Gambar 1.





Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran Preferensi Petani Padi Terhadap Kebijakan

Keterangan :

—————> Alur pemikiran

- - - - -> Alur Analisis

3.2 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka muncul hipotesis yaitu :

1. Karakteristik petani padi mempengaruhi preferensi petani padi terhadap kebijakan pertanian.
2. Preferensi petani lebih dominan pada aspek teknis karena lokasi penelitian merupakan sentra pertanian komoditas tanaman pangan berupa tanaman padi.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Preferensi petani adalah pilihan kecenderungan seseorang dalam menentukan pilihan yang diinginkan agar mencapai kepuasan.
2. Karakteristik adalah spesifikasi petani menurut jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan luas lahan usahatani.
3. Konjoin adalah teknik multivariat yang digunakan secara khusus untuk mengetahui bagaimana preferensi petani terhadap kebijakan dan untuk membantu mendapatkan kombinasi atau komposisi atribut-atribut kebijakan baik baru maupun lama yang paling disukai petani.
4. Atribut adalah elemen-elemen yang terdapat pada kebijakan yang berfungsi mendeskripsikan karakter kebijakan tersebut dan dipandang penting sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan.
5. Kebijakan pembangunan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, efisien, dan terciptanya kesejahteraan petani.
6. Aspek teknis produksi adalah kebijakan pertanian dalam bidang teknis yang meliputi kebijakan pembangunan irigasi, kebijakan teknik usahatani melalui demoplot, dan kebijakan teknik usahatani melalui penyuluhan.

7. Aspek ekonomi produksi adalah kebijakan pertanian dalam bidang ekonomi yang meliputi kebijakan bantuan kredit usahatani, kebijakan harga pupuk, dan kebijakan harga hasil pertanian.
8. Aspek kelembagaan petani adalah kebijakan pertanian dalam bidang kelembagaan yang meliputi kebijakan penguatan kelembagaan petani, kebijakan pengembangan pertanian kawasan, dan kebijakan pengembangan koperasi tani.
9. Kebijakan pembangunan irigasi adalah kebijakan yang memperbaiki jaringan irigasi agar debit air dapat memenuhi kebutuhan petani dengan baik tanpa ada hambatan.
10. Kebijakan perbaikan teknik usahatani melalui demoplota adalah kebijakan yang menggunakan metode penyuluhan pertanian kepada petani dengan cara membuat lahan percontohan, agar petani bisa melihat dan membuktikan terhadap objek yang didemonstrasikan.
11. Kebijakan perbaikan teknik usahatani melalui penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi petani agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, kesejahteraannya, dan meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
12. Kebijakan bantuan kredit usahatani adalah kebijakan yang membantu petani dalam hal pembiayaan usahatani.
13. Kebijakan harga pupuk adalah kebijakan untuk mencapai stabilitas harga pupuk agar tidak melonjak naik yang menyebabkan petani mengeluarkan biaya usahatani tinggi dan ketersediaan pupuk yang memadai.
14. Kebijakan harga hasil pertanian adalah kebijakan untuk mencapai stabilitas harga hasil-hasil pertanian agar petani terlindungi dari harga hasil pertanian yang rendah dan untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional.
15. Kebijakan penguatan kelembagaan petani adalah kebijakan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan petani, baik dari aspek manajemen, permodalan, kegiatan usaha, dan meningkatkan partisipasi anggota kelompok tani.

16. Kebijakan pengembangan pertanian kawasan adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengkonsentrasikan komoditas di lokasi tertentu agar lebih efektif dan efisien.
17. Kebijakan pengembangan koperasi tani adalah kebijakan yang menjalankan fungsi suplai saprodi dan simpan pinjam bagi anggota kelompok tani.

3.3.2 Pengukuran Variabel

Pengukuran indikator variabel dependen dan variabel independen terdapat pada Tabel 1 dengan menggunakan 3 aspek pilihan kebijakan, yaitu : (1) Aspek Teknis Produksi, (2) Aspek Ekonomi Produksi, (3) Aspek Kelembagaan Petani. Skala yang digunakan pada penelitian ini adalah skala likert yang meliputi lima angka penilaian, yaitu: (5) sangat diinginkan (4) diinginkan, (3) kurang diinginkan, (2) tidak diinginkan, (1) sangat tidak diinginkan.

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Pengukuran Variabel
Preferensi Petani	Keputusan petani terhadap pilihan kebijakan pertanian berdasarkan keinginannya	1 = Aspek Teknis Produksi 2 = Aspek Ekonomi Produksi 3 = Aspek Kelembagaan Petani
Aspek Teknis Produksi (X_1)	Kebijakan pembangunan irigasi, Perbaikan teknik usahatani melalui demoplot, Perbaikan teknik usahatani melalui penyuluhan.	Skor diberikan berdasarkan kriteria : 5 = sangat diinginkan 4 = diinginkan 3 = kurang diinginkan 2 = tidak diinginkan 1 = sangat tidak diinginkan
Aspek Ekonomi Produksi (X_2)	Bantuan kredit usahatani, Kebijakan harga pupuk, Kebijakan harga hasil pertanian.	Skor diberikan berdasarkan kriteria : 5 = sangat diinginkan 4 = diinginkan 3 = kurang diinginkan 2 = tidak diinginkan 1 = sangat tidak diinginkan
Aspek Kelembagaan Petani (X_3)	Penguatan kelembagaan petani, Pengembangan pertanian kawasan, Pengembangan koperasi tani.	Skor diberikan berdasarkan kriteria : 5 = sangat diinginkan 4 = diinginkan 3 = kurang diinginkan 2 = tidak diinginkan 1 = sangat tidak diinginkan

IV. METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif didasari pada deskripsi naratif atas fenomena yang diteliti (W. Vanderstoep & Johnston, 2009). Metode deskriptif dilaksanakan dengan tujuan untuk menggambarkan fenomenayang berlangsung tanpa adanya rekayasa dan manipulasi keadaan. Metode deskriptifmenjelaskan gambaran umum mengenai karakteristik petani serta proses keputusan kebijakan pertanian yang lebih diinginkanpetani padi. Instrumen yang digunakan pada penelitian kuantitatif ini menggunakan kuisisioner yang bersifat tertutup yang dapat dilihat pada Lampiran 6.

4.2 Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian ini merupakan sentra pertanian khususnya produksi tanaman pangan padi terbesar di Kabupaten Trenggalek. Mayoritas penduduk yang adadi desa ini adalah petani. Penentuan lokasi penelitian juga berdasarkan pertimbangan *key informan* yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2017 sampai dengan Januari 2018.

4.3 Teknik Penentuan Sampel

Penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* yaitu pengumpulan informasi dan pengetahuan dari responden menggunakan metode dengan pendekatan *simple random sampling*. Metode *simple random sampling* pada penelitian ini mempunyai arti bahwa semua petani padi di salah satu desa di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Sampel yang digunakan dalam penelitian merupakan responden yang berprofesi sebagai petani padi di Desa Malasan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Responden yang dijadikan sampel merupakan petani padi yang bisa ditemui dan bersifat homogen dengan

sampel lainnya. Syarat lainnya yaitu responden yang dapat membuat keputusan dalam penentuan kebijakan pertanian yang lebih diinginkan untuk ke depannya.

Cara pengukuran yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel yaitu dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Parel *et al.* (1973). Alasan menggunakan rumus Parel dikarenakan lebih representatif terhadap sampel perhitungan yang mempertimbangkan variasi populasi dalam menentukan sampel. Apabila dalam populasi memiliki tingkat variasi yang rendah, maka sampel penelitian akan semakin kecil, namun apabila variasi dalam populasi tinggi maka sampel penelitian akan semakin besar sehingga sampel tersebut bisa mewakili keseluruhan populasi. Agar sampel yang diambil dapat mewakili keseluruhan populasi ditentukan dengan rumus yang dikemukakan oleh Parel *et al.* (1973) yaitu:

$$n = \frac{NZ^2s^2}{Nd^2 + Z^2s^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel minimum

N = jumlah populasi

Z = nilai di tingkat kepercayaan tertentu, yaitu 95% (nilai sebesar 1.96)

s^2 = nilai varians dari sampel

d = kesalahan maksimum yang ditoleransi (5%)

Perhitungan varians sampel (s^2) dalam penelitian ini menggunakan sampel kecil (n) yang keragamannya didasarkan pada keragaman luas lahan. Rumus untuk menghitung varians dari sampel ditunjukkan pada persamaan:

$$s^2 = \frac{n \sum X^2 - (\sum X)^2}{n(n-1)}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel minimum (20 petani)

X = luas lahan

Berdasarkan rumus perhitungan varians sampel diatas didapatkan nilai varians dari sampel sebesar 0,0456. Jumlah sampel yang digunakan agar dapat mewakili keseluruhan populasi adalah 50 orang. Perhitungan pengambilan sampel dapat dilihat pada Lampiran 1.

4.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data karakteristik petani padi dan pemilihan kebijakan pertanian. Data karakteristik petani meliputi tingkat pendidikan, luas lahan yang diusahakan petani, dan jumlah pendapatan petani padi. Sedangkan data pemilihan kebijakan pertanian telah ditentukan berdasarkan aspek-aspek yang meliputi aspek teknis produksi, ekonomi produksi, dan kelembagaan pertanian.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder yang diperoleh didapatkan melalui perantara ketiga yaitu pengambilan data petani padi di BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Kabupaten Trenggalek. Data sekunder juga diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Republik Indonesia, yaitu provinsi-provinsi di Indonesia yang berisi kontribusi sektor pertanian di pulau Jawa. Data sekunder juga diperoleh dari dokumen, literatur, jurnal ilmiah, laporan kajian terdahulu yang relevan, serta sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder diatas, peneliti melakukan pengumpulan data dengan beberapa teknik. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi.

A. Wawancara

Kegiatan wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi dari responden untuk menjawab tujuan penelitian. Kegiatan ini meliputi tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung. Proses wawancara dilakukan dengan cara mendatangi ke rumah responden secara langsung dan dapat dilihat pada Lampiran 7. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan topik penelitian dan dicatat oleh peneliti melalui kuisisioner. Jenis kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner tertutup dengan pembatasan jawaban bagi responden atau pilihan jawaban telah disediakan oleh peneliti.

B. Observasi

Observasi dilakukan dalam rangka untuk memperluas dan memperdalam data, informasi, dan mengetahui karakteristik petani padi yang bertempat di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi. Adapun tahap-tahap observasi adalah sebagai berikut:

1. Bertemu dengan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Trenggalek untuk memberikan rekomendasi yang terkait dengan permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan.
2. Bertemu dengan penyuluh pertanian di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) untuk memberikan data kelompok tani dan ketua kelompok tani agar dapat dimintai izin serta arahan dalam melakukan penelitian ini.
3. Bertemu dengan petani padi untuk memberikan kuisioner langsung dan melakukan wawancara secara langsung di rumah mereka masing-masing.

4.5 Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif deskriptif berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian. Pengolahan data dengan menggunakan metode kuantitatif yaitu untuk mengukur preferensi petani terhadap atribut dan taraf-tarafnya (level tiap atribut) kebijakan pertanian, menggunakan analisis konjoin. Kemudian, akan diketahui preferensi petani padi terhadap kebijakan pertanian yang lebih disukai.

4.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik petani dalam memilih kebijakan pertanian yang telah diterapkan. Data dan informasi berasal dari kuisioner yang diolah dan disajikan dalam bentuk uraian dan tabulasi sederhana. Hasil yang diperoleh kemudian dipresentasikan berdasarkan jumlah responden. Persentase dari setiap hasil adalah faktor dominan dari masing-masing variabel yang dianalisis.

4.5.2 Analisis Konjoin

Analisis konjoin digunakan untuk menganalisis preferensi petani terhadap kebijakan pertanian. Proses ini diawali dengan melakukan pencarian informasi mengenai atribut mana saja yang menjadi pertimbangan petani dalam memilih kebijakan yang diinginkan. Pemilihan atribut dilakukan beserta dengan taraf-tarafnya yang memungkinkan dan mudah dipahami oleh petani. Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap suatu produk baik berupa barang dan jasa salah satunya adalah analisis konjoin. Aaker *et al.*

(2003) menyatakan bahwa analisis konjoin memberikan ukuran kuantitatif dari kepentingan relatif satu atribut dengan atribut lainnya. Analisis konjoin adalah teknik multivariat yang digunakan secara khusus untuk mengetahui bagaimana preferensi konsumen terhadap suatu produk atau jasa dan untuk membantu mendapatkan kombinasi atau komposisi atribut-atribut suatu produk atau jasa baik baru maupun lama yang paling disukai konsumen. Atribut-atribut merupakan elemen-elemen yang terdapat pada suatu produk yang berfungsi mendeskripsikan karakter produk tersebut.

Churcill (2005) mendefinisikan analisis konjoin sebagai suatu teknik pemberian nilai oleh responden pada setiap atribut produk disimpulkan dari preferensi yang diekspresikannya terhadap berbagai kombinasi atribut produk tersebut. Syahfitriani, dkk (2013) mengartikan analisis konjoin juga diartikan sebagai teknik analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan yang relatif berdasarkan persepsi pelanggan yang dibawa oleh suatu produk tertentu dan nilai kegunaan yang muncul dari atribut-atribut produk terkait. Mattjik dan Sumertajaya (2011) mengartikan analisis konjoin sebagai teknik untuk mengukur preferensi konsumen terhadap produk dan jasa. Analisis konjoin berdasarkan pada subyektivitas konsumen terhadap beberapa kombinasi fitur yang ditawarkan. Subyektivitas konsumen ini diukur melalui peringkat (*rank*) atau skor (skala likert). Tujuan analisis adalah memperoleh skor kegunaan (*utility*) yang dapat mewakili kepentingan setiap aspek produk sehingga dari skor dapat ditarik kesimpulan tentang atribut yang paling dipertimbangkan konsumen dalam memilih produk (Mattjik dan Sumertajaya, 2011).

Tahapan dalam merancang dan melaksanakan analisis konjoin (Aaker *et al.* 2003 dan Santoso, 2010) adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan atribut dan taraf atribut

Tahap awal pada analisis konjoin adalah pemilihan atribut dan taraf yang akan digunakan dalam merancang stimuli. Penentuan atribut dan taraf pada penelitian ini diperoleh dari penggalan informasi dari petani padi melalui wawancara, kajian literatur penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Atribut dan taraf atribut yang dievaluasi pada penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Atribut dan taraf atribut kebijakan pertanian

Atribut	Taraf Level
Aspek teknis produksi	1. Kebijakan pembangunan irigasi 2. Perbaikan teknik usahatani melalui demoplot 3. Perbaikan teknik usahatani melalui penyuluhan
Aspek ekonomi produksi	1. Bantuan kredit usahatani 2. Kebijakan harga pupuk 3. Kebijakan harga hasil pertanian
Aspek kelembagaan petani	1. Penguatan kelembagaan petani 2. Pengembangan pertanian kawasan 3. Pengembangan koperasi tani

2. Perancangan stimuli

Tahap perancangan stimuli ini dilakukan dengan stimuli atau profil produk yang berarti yaitu kombinasi dari taraf atribut satu dengan taraf atribut yang lainnya. Pada penelitian ini perancangan stimuli menggunakan pendekatan *full profile*. Pendekatan *full profile* atau profil penuh merupakan kombinasi yang ekstrim dan yang tidak masuk akal dapat dihilangkan. Penilaian stimuli, setiap responden diminta untuk menilai atau mengurutkan stimuli, nilai ranking (paling disukai hingga paling tidak disukai) sehingga mencerminkan perilaku konsumen dalam situasi nyata. Maka dari itu, banyaknya stimuli yang dihasilkan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Jumlah level sama dalam variabel

$$k \times k \times \dots \times k = k^N$$

Jumlah level berbeda pada tiap variabel

$$k \times k \times \dots \times k \times l \times l \dots \times l = k^N \times l^M$$

Keterangan :

k,l = banyak level yang sama pada atribut

N,M = banyak variabel yang jumlah levelnya sama

Banyaknya stimuli yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu:

$$3 \times 3 \times 3 = 27 \text{ stimuli}$$

Sehingga dapat disimpulkan stimuli yang didapat dari hasil perhitungan rumus di atas yaitu sebanyak 27 stimuli.

3. Penentuan jenis data

Data yang diperlukan dalam analisis konjoin dapat berupa nonmetrik (nominal dan ordinal) maupun metrik (berskala interval atau rasio). Pada

penelitian ini, peneliti menggunakan data nonmetrik dan data metrik. Responden diminta mengurutkan stimuli dari urutan 5 untuk stimuli yang paling diinginkan sampai urutan 1 untuk stimuli yang paling tidak diinginkan. Hal ini dapat menunjukkan perilaku petani dalam situasi nyata.

4. Penilaian Stimuli

Pada tahap penilaian stimuli, setiap responden diminta untuk menilai atau mengurutkan stimuli, nilai ranking (yang paling diinginkan hingga yang paling tidak diinginkan) sehingga mencerminkan perilaku konsumen dalam situasi nyata. Proses analisis data dengan metode konjoin menggunakan bantuan *software* SPSS 25. Adapun secara umum model dasar analisis konjoin (Gustafsson A *et al.*, 2007) dengan prosedur analisis tersebut adalah :

$$U(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{kj} \beta_{ij} X_{ij}$$

Keterangan :

$U(x)$ = Utilitas total

kj = Banyak taraf ke-j dari atribut ke-i atau banyaknya level atribut i

m = Jumlah atribut

β_{ij} = Nilai kegunaan atribut ke-i taraf ke-j

X_{ij} = Atribut ke-i taraf ke-j (jika taraf ke-j atribut ke-i terjadi (1), tidak (0))

i = 1,2, ..., m (atribut ke-i)

j = 1,2, ..., kj (level ke-j)

5. Interpretasi Hasil

Tahapan terakhir dari analisis konjoin adalah interpretasi hasil. Pada tahap ini didapatkan nilai utiliti yang merupakan nilai setiap taraf dari masing-masing faktor, atau sifat relatif terhadap taraf lainnya. Preferensi petani didapatkan dari nilai utiliti yang menunjukkan bahwa semakin besar nilai utiliti maka semakin diinginkan oleh petani. Interpretasi ini akan menjawab tujuan kedua pada penelitian.

Sedangkan tujuan ketiga pada penelitian dapat diketahui melalui gabungan dari nilai utiliti yang terbesar pada setiap atributnya. Sehingga akan diketahui kombinasi yang paling disukai dan dapat diketahui pula faktor yang paling

mempengaruhi responden dalam memilih kombinasi-kombinasi. Ada beberapa ketentuan dalam utiliti yaitu :

- a. Taraf yang memiliki nilai utiliti lebih tinggi adalah taraf yang lebih disukai.
- b. Total utiliti masing-masing kombinasi sama dengan jumlah utiliti tiap taraf dari faktor-faktor tersebut.
- c. Kombinasi yang memiliki total utiliti tertinggi adalah kombinasi yang paling disukai responden.
- d. Faktor yang memiliki perbedaan utiliti lebih besar antara nilai utiliti taraf tertinggi dan terendahnya merupakan faktor yang lebih penting.
- e. Jika semua kemungkinan taraf suatu faktor memiliki nilai utiliti yang sama, berarti faktor tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap responden.



V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

5.1.1 Keadaan Geografis dan Batas Administrasi

Menurut data BPS (2017), Kabupaten Trenggalek adalah salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Trenggalek yang berjarak 180 km dari Surabaya yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini menempati wilayah seluas 1.205,22 km² yang dihuni ±700.000 jiwa. Kabupaten Trenggalek berada di pesisir pantai selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten Trenggalek, meliputi:

Sebelah utara : Kabupaten Ponorogo

Sebelah timur : Kabupaten Tulungagung

Sebelah selatan : Samudera Hindia

Sebelah barat : Kabupaten Pacitan

Kabupaten Trenggalek terdiri dari 14 kecamatan yang salah satunya adalah Kecamatan Durenan. Secara geografis, Kecamatan Durenan terletak diantara 111°45'30" – 111°51'30" BT dan 8°01'30" – 8°09'00" LS. Kecamatan Durenan berada di ketinggian 92– 104 mdpl. Batas-batas wilayah Kecamatan Durenan, meliputi:

Sebelah utara : Kecamatan Gondang

Sebelah timur : Kecamatan Pakel

Sebelah selatan : Kecamatan Bandung

Sebelah barat : Kecamatan Pogalan

Kecamatan Durenan meliputi 14 desa, yaitu Ngadisoko, Durenan, Pandean, Pangungsari, Malasan, Karangnom, Baruharjo, Kamulan, Sumbergayam, Pakis, Semarum, Kendalrejo, Gador, dan Sumberejo. Berdasarkan topografinya, desa-desa yang berada di Kecamatan Durenan sebagian besar merupakan daerah dataran. Kecamatan Durenan memiliki luas 5.716 ha, terdiri dari 1.398 ha tanah sawah, 4.253 ha lahan kering dan 65 ha lahan lainnya.

Desa yang digunakan sebagai lokasi penelitian yaitu Desa Malasan yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Secara astronomis dan topografi, Desa Malasan terletak diantara 111.53410 BT – 8.23943 LS dengan topografi datar. Desa Malasan

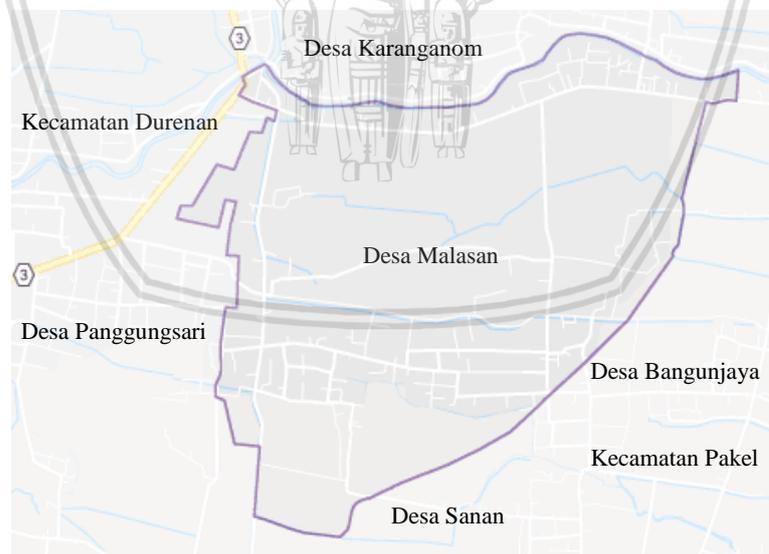
berada di ketinggian 95 mdpl. Luas wilayah Desa Malasan yaitu sebesar 417.761 ha. Desa Malasan terdiri dari 5 Dusun, 10 RW, dan 40 RT. Batas wilayah Desa Malasan berdasarkan desa, kelurahan, dan kecamatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Batas Geografi

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Karanganom	Kecamatan Durenan
Sebelah Selatan	Desa Sanan	Kecamatan Pakel
Sebelah Timur	Desa Bangunjaya	Kecamatan Pakel
Sebelah Barat	Desa Panggungsari	Kecamatan Durenan

Sumber: Data Monografi Desa Tahun 2017

Desa Malasan berbatasan dengan Desa Karanganom di sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Sanan di sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Bangunjaya di sebelah Timur, dan berbatasan dengan Desa Panggungsari di sebelah Barat. Sedangkan untuk perbatasan kecamatan Desa Malasan berbatasan dengan Kecamatan Durenan di sebelah Utara dan Barat, serta Kecamatan Pakel di sebelah Selatan dan Timur. Berikut ini merupakan peta wilayah Desa Malasan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada Gambar 2.



Sumber: BPS Desa Malasan Tahun 2017

Gambar 2. Peta Wilayah Desa Malasan

5.1.2 Jumlah Penduduk Desa Malasan

Jumlah penduduk di Desa Malasan berjumlah 6200 jiwa. Berdasarkan dengan jenis kelaminnya dibagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Persentase jumlah laki-laki sebesar 48,98% dan persentase jumlah perempuan sebesar 51,02%. Jumlah Penduduk di malasan berdasarkan jenis kelamin disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Malasan

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Laki-laki	3037	49
Perempuan	3163	51
Total	6200	100

Sumber : Data Monografi Desa Tahun 2017

Berdasarkan data Tabel 4 maka dapat diambil kesimpulan bahwa penduduk dengan jenis kelamin terbanyak yaitu perempuan sebesar 51%. Selisih antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak berbeda jauh yaitu sebesar 2%.

5.2 Karakteristik Petani

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis karakteristik petani adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 responden. Gambaran umum karakteristik petani ini terbagi menjadi 4 yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan luas lahan usahatani. Responden yang didapat yaitu petani yang melakukan usahatani padi. Secara rinci identifikasi mengenai karakteristik petani adalah sebagai berikut:

5.2.1 Jenis Kelamin Petani

Jenis kelamin merupakan salah satu karakteristik yang sangat berpengaruh pada preferensi petani terhadap kebijakan pertanian. Pada Tabel 5 merupakan data banyaknya responden dalam penelitian berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 5. Karakteristik Petani Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Laki-laki	50	100
Perempuan	0	0
Total	50	100

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa seluruh responden berjenis kelamin laki-laki. Dengan hasil yang menunjukkan persentase responden laki-laki sebesar 100 persen. Hal ini menandakan bahwa mayoritas petani yang aktif yaitu berjenis kelamin laki-laki. Mayoritas lebih banyak pria karena pria merupakan kepala keluarga yang harus mencukupi kebutuhan keluarga sehingga preferensi petani terhadap kebijakan pertanian didominasi oleh kaum pria yang memang bekerja sebagai petani (Kusumawati, dkk, 2015).

5.2.2 Usia Petani

Usia merupakan salah satu hal yang mempengaruhi pembentukan preferensi petani terhadap kebijakan pertanian. Hal ini dikarenakan usia akan mempengaruhi pola pikir petani untuk memutuskan pilihannya. Perbedaan usia juga akan mengakibatkan perbedaan selera dan kesukaan terhadap apa yang akan dipilihnya (Sumarwan, 2003). Karakteristik petani berdasarkan usia petani dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Karakteristik Petani Berdasarkan Usia

Usia (th)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
27-38	4	8
39-50	12	24
51-62	26	52
63-74	8	16
Total	50	100

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa karakteristik petani padi berdasarkan usia didapatkan hasil yaitu mulai dari 27 tahun sampai dengan 74 tahun dari total responden 50 orang. Persentase terbesar yaitu petani pada usia 51-62 tahun sebesar 52%, kemudian pada usia 39-50 tahun sebesar 24%, usia 63-74 tahun sebesar 16%, dan usia 27-38 tahun sebesar 8%. Hasil karakteristik petani berdasarkan usia menunjukkan bahwa usia petani mayoritas sebesar 87% berada pada usia yang produktif dan sisanya sebesar 13% berada pada usia yang sudah tidak produktif lagi dalam melakukan usahatani padi. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Petani yang memiliki usia produktif akan lebih memiliki fisik yang kuat daripada pada usia yang tidak produktif. Karakteristik berdasarkan usia

mempunyai hubungan dengan sikap seseorang karena semakin tua umur seseorang semakin berhati-hati menghadapi perubahan.

5.2.3 Tingkat Pendidikan Petani

Tingkat pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan tersebut dapat ditempuh melalui pendidikan tertentu. Jalur pendidikan dapat diartikan sebagai sarana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri. Pendidikan merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi pola pikir petani. Pendidikan akan mempengaruhi dan menentukan proses pengambilan keputusan. Petani yang mempunyai pendidikan tinggi akan sangat responsif terhadap informasi dan bersikap lebih kritis dalam menilai sesuatu. Pendidikan petani dapat berupa pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Namun, dalam penelitian ini lebih fokus pada pendidikan formal petani. Karbede (2001) berpendapat bahwa pendidikan dapat meningkatkan kemampuan petani untuk mencari, memperoleh dan menginterpretasikan informasi yang berguna tentang usahatani. Data karakteristik petani berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Karakteristik Petani Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Tidak Sekolah	2	4
Tidak Tamat SD	3	6
Tamat SD	11	22
Tamat SMP	5	10
Tamat SMA	22	44
Tamat D3	3	6
Sarjana/lebih tinggi	4	8
Total	50	100

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 7 dapat disimpulkan bahwa kategori pendidikan petani pada penelitian ini terdiri dari 7 kelompok yaitu Tidak Sekolah, Tidak Tamat SD, Tamat SD, Tamat SMP, Tamat SMA, Tamat D3, dan Sarjana/lebih tinggi. Dari 50 responden sebagian besar memiliki latar belakang tingkat pendidikan tamatan SMA sebanyak 22 orang atau sebesar 44%, tamatan SD sebanyak 11 orang atau sebesar 22% , tidak tamat SMP sebanyak 5 orang atau sebesar 10%, tamatan sarjana atau lebih tinggi sebanyak 4 orang atau sebesar 8%, sedangkan

tingkat pendidikan tidak tamat SD dan tamatan D3 sama-sama sebanyak 3 orang atau sebesar 6%, dan responden yang tidak sekolah sebanyak 2 orang atau sebesar 4%. Dari data karakteristik petani berdasarkan tingkat pendidikan bahwa mayoritas responden telah menempuh pendidikan dengan wajib belajar 12 tahun dan hal ini dikatakan bahwa tingkat pendidikan petani dianggap baik. Dapat disimpulkan bahwa petani padi mayoritas sudah mampu melihat dan menilai kebijakan pertanian lebih kritis dan mampu memilih kebijakan yang dianggap bisa memenuhi kebutuhan petani padi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kusumawati, dkk (2015) bahwa karakteristik tingkat pendidikan juga tidak lepas dari preferensi petani, karena secara tidak nyata pendidikan akan mengubah pola pikir seseorang.

5.2.4 Luas Lahan Usahatani

Luas lahan usahatani merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pendapat petani atas pilihan kebijakan pertanian yang lebih diinginkan. Karakteristik responden berdasarkan luas lahan usahatani pada penelitian ini merupakan luas lahan usahatani yang dikelola oleh masing-masing petani baik yang dimiliki sendiri maupun sewa dengan satuan luas berupa hektar (ha). Data karakteristik petani berdasarkan luas lahan dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Karakteristik Petani Berdasarkan Luas Lahan

Luas Lahan (ha)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
0-0,25	7	14
0,26-0,5	12	24
0,51-0,75	7	14
0,76-1	13	26
>1	11	22
Total	50	100

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Dari Tabel 8 dapat disimpulkan bahwa karakteristik petani berdasarkan luas lahan terbesar yaitu 0,76-1 ha dengan persentase sebesar 26%, kemudian pada luas lahan antara 0,26-0,5 ha sebesar 24%, luas lahan diatas 1 ha sebesar 22%, dan luas lahan antara 0-0,25 ha serta antara 0,51-0,75 ha sama-sama sebesar 14%.

5.3 Preferensi Petani

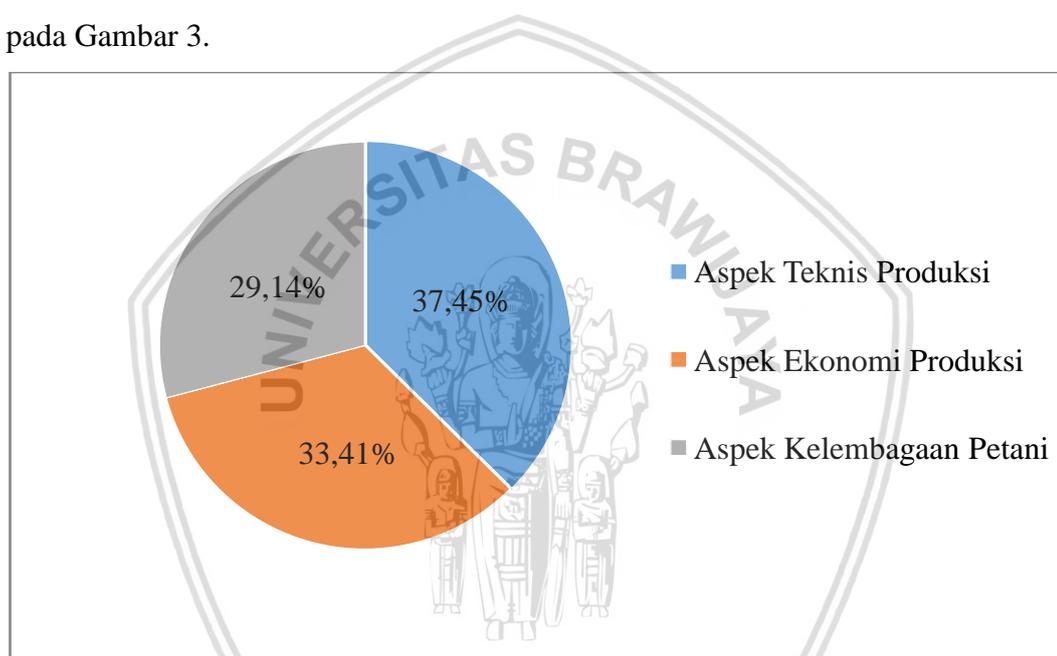
Analisis konjoin pada penelitian ini merupakan suatu metode untuk membantu mendapatkan kombinasi atribut-atribut kebijakan pertanian yang paling disukai oleh petani. Analisis ini juga membantu untuk mengetahui preferensiseorang terhadap suatu objek yang terdiri atas satu atau banyak bagian (Suharjo, 2001). Hasil utama dari analisis konjoin ini adalah suatu bentuk kombinasi kebijakan yang diinginkan oleh petani.

Pada penelitian ini, atribut yang digunakan berjumlah tiga yang terbagi menjadi beberapa level atribut. Atribut dan level yang diteliti adalah atribut pertama yaitu aspek teknis produksi. Atribut kebijakan ini terbagi menjadi tiga level atribut yaitu kebijakan pembangunan irigasi, perbaikan teknik usahatani melalui demoplot, dan perbaikan teknik usahatani melalui penyuluhan. Kemudian atribut kedua yaitu aspek ekonomi produksi. Atribut kebijakan ini terbagi menjadi tiga level atribut yaitu kebijakan bantuan kredit usahatani, kebijakan harga pupuk, dan kebijakan harga hasil pertanian. Sedangkan untuk atribut ketiga yaitu aspek kelembagaan petani. Atribut kebijakan ini juga terbagi menjadi tiga level atribut yaitu kebijakan penguatan kelembagaan petani, pengembangan pertanian kawasan, dan pengembangan koperasi tani.

Ketiga atribut yang ada kemudian dilakukan analisis konjoin dengan bantuan program SPSS 25 untuk mendapatkan kombinasi yang paling disukai petani. Hasil dari penilaian kuisisioner dan wawancara kepada petani mengenai kebijakan yang paling disukai oleh petani diperoleh hasil perhitungan sampel responden. Selanjutnya dari hasil perhitungan sampel responden, diperoleh hasil stimuli petani dari setiap preferensi. Pada analisis konjoin dengan menggunakan software SPSS ini juga mendapatkan hasil kombinasi preferensi petani setiap atributnya yang dapat dilihat pada Lampiran 2 dan Lampiran 3.

Preferensi petani terhadap kebijakan pertanian dapat diketahui berdasarkan analisis konjoin yang menghasilkan nilai kegunaan (*utility*) pada setiap level atribut yang ada. Apabila nilai kegunaan telah diketahui, maka dapat diketahui nilai total kegunaan pada setiap stimuli kombinasi yang memiliki nilai tertinggi sesuai dengan preferensi petani. Perhitungan metode konjoin dengan menggunakan program SPSS 25 akan menghasilkan dua macam nilai yaitu nilai

positif dan nilai negatif. Namun pada beberapa level atribut dalam satu atributnya terdapat lebih dari satu macam level atribut yang mempunyai nilai yang sama (positif atau negatif). Angka positif menunjukkan bahwa petani menginginkan atau menyukai level atribut tersebut. Angka negatif menunjukkan bahwa petani tidak menginginkan level atribut tersebut. Langkah terakhir pada analisis konjoin ini yaitu menggabungkan perhitungan yang telah didapatkan untuk mendapatkan nilai *utility* yang dapat dilihat pada Lampiran 4. Hasil SPSS dari kegunaan seluruh atribut kebijakan dapat dilihat pada Lampiran 5. Sedangkan berdasarkan hasil analisis diperoleh peringkat relatif atribut penting dari kebijakan pertanian seperti pada Gambar 3.



Sumber : Data Primer Tahun 2018

Gambar 3. Rata-rata Nilai Kepentingan Atribut Kebijakan

Hasil olah data yang ditampilkan pada Gambar 3 terlihat bahwa tingkat kepentingan tertinggi adalah aspek teknis produksi yaitu sebesar 37,45%, untuk urutan tingkat kepentingan kedua adalah aspek ekonomi petani yaitu sebesar 33,41%, sedangkan urutan terakhir yaitu aspek kelembagaan petani yaitu sebesar 29,14%. Perbedaan tingkat kepentingan pada ketiga atribut tersebut sangat kecil. Hal ini disebabkan karena atribut aspek teknis produksi, aspek ekonomi produksi, dan aspek kelembagaan petani memiliki peranan yang penting bagi petani. Petani padi di Desa Malasan lebih mementingkan aspek teknis produksi (37,45%),

daripada aspek ekonomi produksi (33,41%), dan aspek kelembagaan petani (29,14%).

Hasil data yang telah diolah juga didukung dengan fakta permasalahan sosial yang ada. Desa Malasan memiliki fenomena sosial berupa adanya keinginan petani untuk melakukan intensifikasi usahatani yang ada. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman yang memadai pada aspek teknis produksi. Petani padi merasa tidak memahami tentang adanya perbedaan cuaca yang ekstrem sehingga berpengaruh terhadap hasil panen. Sedangkan hama dan penyakit yang ada juga semakin beragam. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek, Joko Surono (2017) pada Detiknews mengatakan bahwa pada bulan Juli 2017 serangan hama wereng tersebar di hampir semua kecamatan dengan wilayah terparah berada di Kecamatan Durenan. Para petani padi diimbau untuk melakukan konsultasi dengan penyuluh maupun petugas yang ada di lapangan, sehingga pembasmian dan penanggulangan hama bisa berjalan maksimal. Petani padi mengeluhkan hasil produksi pertanian yang menurun karena adanya permasalahan maupun gangguan di dalam aspek teknis produksi. Oleh karena itu, petani padi Desa Malasan lebih menginginkan kebijakan yang berkaitan dengan aspek teknis produksi pertanian agar dapat membantu petani menyelesaikan masalah yang sering terjadi di lahan mereka.

Fakta permasalahan yang ada di Desa Malasan terkait dengan aspek ekonomi produksi yaitu tentang harga input dan output usahatani. Petani menginginkan harga input yang seminimal mungkin dengan hasil output yang semaksimal mungkin. Namun, kenyataan yang ada tentang harga input seperti harga pupuk tidak stabil dan banyak petani yang mengeluhkan harga pupuk yang semakin mahal. Ketersediaan pupuk di pasaran juga dikeluhkan oleh petani. Walaupun terdapat subsidi pupuk dari pemerintah, namun tidak tersedia tepat waktu. Hal ini yang membuat petani membeli pupuk non subsidi dengan harga yang mahal. Menurut data BPS (2017), harga yang didapatkan petani padi untuk pupuk subsidi Urea dan SP36 sebesar Rp. 1.900 sampai Rp. 2.000 per kg, namun jika harga pupuk non subsidi bisa mencapai Rp. 4.500 sampai dengan Rp. 5.000 per kg. Petani membutuhkan harga pupuk yang stabil dan ketersediaan pupuk yang memadai. Selain itu, petani juga menginginkan harga hasil pertanian

yang semaksimal mungkin. Mengingat bahwa pengeluaran biaya input yang semakin tinggi membuat petani menginginkan harga output yang semakin tinggi pula. Petani menginginkan adanya harga dasar yang tetap diberlakukan untuk melindungi petani pada saat panen raya terjadi.

Sedangkan untuk kebijakan pertanian aspek kelembagaan petani, fakta yang ada di Desa Malasan yaitu kelembagaan petani telah berjalan dengan baik. Desa Malasan, Kecamatan Durenan meraih kategori Desa Terbaik ke II Lomba Gotong Royong Jawa Timur 2016 yang digawangi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Gotong royong dilakukan khususnya pada sektor pertanian dan masyarakat saling bahu membahu saat musim tanam serta saat panen tiba. Petani di Desa Malasan juga rutin melakukan jimpitan berupa beras yang merupakan tradisi turun temurun setelah panen. Hal ini dilakukan untuk tetap mempertahankan penguatan kelompok tani yang ada di desa Malasan (Zarkasi, 2016). Awalnya kelembagaan petani tidak berjalan dengan baik. Namun, semenjak Desa Malasan ditetapkan sebagai salah satu kawasan sentra pertanian maka banyak perubahan yang terjadi pada aspek kelembagaan petani. Petani menjadi semakin aktif satu sama lain demi memperbaiki usahatani menjadi lebih baik. Petani mulai sadar bahwa adanya kelompok tani sangat membantu seluruh kegiatan usahatani. Penyebaran informasi yang cepat dan merata juga sangat diinginkan petani agar tidak tertinggal informasi seputar pertanian. Kelembagaan petani merupakan hal yang sangat penting dan membantu petani seperti dalam urusan pengairan irigasi, subsidi benih, subsidi pupuk, informasi harga input dan output pertanian, serta kegiatan penyuluhan pertanian. Melalui kelembagaan petani, dapat mempermudah dalam melakukan koordinasi diantara petani dan antara kelompok. Demikian juga melalui kelompok maka akan memperkuat posisi tawar dalam pasar yang kompetitif.

Tingkat preferensi petani terhadap kebijakan ditunjukkan pada hasil analisis konjoin yang diperoleh yaitu pada tingkat kepentingan atribut. Tingkat kepentingan atribut adalah tingkat kepentingan yang diperoleh secara keseluruhan dari tahapan analisis konjoin yang menjelaskan bahwa tingkat preferensi petani terhadap keinginan suatu atribut yang telah ditentukan. Menurut Simatupang (2003) kebijakan pertanian bersifat dinamis dan melingkar dalam arti harus selalu

dimonitor, dievaluasi, dan disempurnakan sehingga kebijakan semakin efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan pemahaman tentang keinginan petani agar analisis kebijakan sesuai dengan preferensi petani. Jadi berdasarkan penelitian, fenomena sosial, serta dukungan literatur didapatkan kesinambungan yang berkaitan.

5.3.1 Nilai Kegunaan (*Utility*) Atribut Aspek Teknis Produksi

Tabel 9. Nilai Kegunaan (*Utility*) Atribut Aspek Teknis Produksi

Level Atribut Aspek Teknis Produksi	<i>Utility Estimate</i>	<i>Std. Error</i>
Kebijakan Pembangunan Irigasi	-.260	.005
Perbaikan Teknik Usahatani-Demo Plot	-.431	.005
Perbaikan Teknik Usahatani-Penyuluhan	.692	.005

Sumber: *Data Primer Tahun 2018*

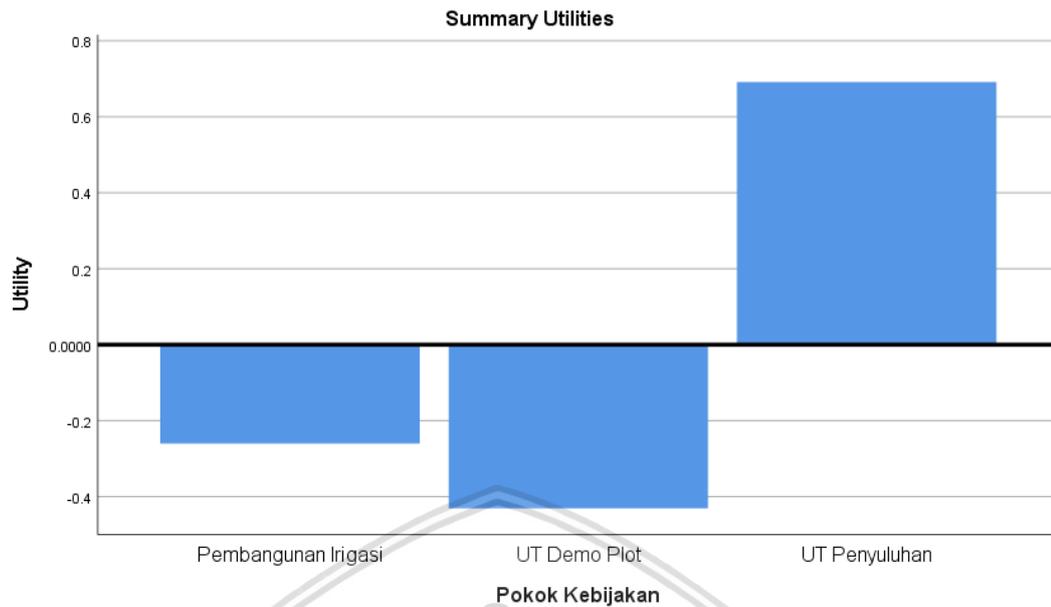
Pada Tabel 9 dapat diketahui bahwa kebijakan pertanian pada aspek teknik produksi yang paling diinginkan petani adalah kebijakan perbaikan teknik usahatani melalui penyuluhan dengan nilai kegunaan sebesar 0,692. Urutan kedua yaitu kebijakan pembangunan irigasi dengan nilai kegunaan sebesar -0,260 Pada urutan terakhir yaitu kebijakan perbaikan teknik usahatani melalui demo plot dengan nilai kegunaan sebesar -0,431. Petani lebih menginginkan kebijakan perbaikan teknik usahatani melalui penyuluhan daripada kebijakan pembangunan irigasi dan kebijakan perbaikan teknik usahatani melalui demoplot.

Hasil data yang telah diolah juga didukung dengan fakta permasalahan sosial yang ada. Petani padi di Desa Malasan lebih menginginkan kebijakan perbaikan teknik usahatani melalui penyuluhan karena mayoritas petani berpendidikan tinggi, sehingga petani lebih memilih keuntungan yang didapat dari penyuluhan. Petani sangat membutuhkan penyuluhan yang lebih baik agar usahatani dapat dijalankan dengan efektif dan efisien serta dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusahatani. Untuk mempertegas permasalahan hama wereng yang terjadi pada bulan Juli 2017 lalu, petani menginginkan solusi untuk mengatasi agar hama wereng tidak mewabah lagi di desa Malasan. Joko Surono selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek mengatakan bahwa mewabahnya hama wereng disebabkan oleh sejumlah faktor. Diantaranya sistem pola tanam petani yang tidak serentak antara menanam tanaman padi dan tanaman palawija. Selain itu penggunaan obat-obatan pertanian yang tidak sesuai anjuran dan melebihi dosis dapat membuat hama wereng menjadi kebal dengan

obat-obatan bahkan akan memperparah keadaan yang menyebabkan peledakan hama wereng. Perbaikan usahatani melalui penyuluhan, petani dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam berusahatani sehingga petani tidak salah dalam mengambil tindakan yang dapat merugikan petani ke depannya. Perbaikan dalam penyuluhan sistem pola tanam juga diperlukan oleh petani agar petani padi dapat melakukan sistem pola tanam dengan serempak. Bapak Suwito selaku PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) desa Malasan mengatakan bahwa pengetahuan petani tentang waktu yang tepat pada saat pergantian tanam menjadi tanaman palawija kurang diketahui secara pasti. Hal ini yang menyebabkan hama wereng menyerang Desa Malasan karena petani melakukan tanam padi secara terus menerus selama 4 musim tanam. Seluruh responden petani padi di Desa Malasan, Kecamatan Durenan mengalami serangan hama wereng yang menyebabkan petani gagal panen. Bapak Agus sebagai salah satu responden yang mempunyai lahan 0,7 ha hanya mendapatkan hasil panen sebesar 90 kw padahal jika dibandingkan dengan hasil panen sebelumnya yang tidak terserang hama wereng tersebut hasil panen yang didapatkan yaitu sebesar 5 ton. Sama halnya dengan Bapak Jarwo yang merupakan responden dengan luas lahan yang dimiliki sebesar 1 ha hanya mendapatkan hasil panen 2 ton 60 kw dari hasil panen sebelum terserang hama yaitu sebesar 7 ton 3 kw. Petani padi melakukan penyemprotan untuk membasmi hama wereng secara besar besaran. Bapak Agus dan Bapak Jarwo melakukan penyemprotan 7 hingga 10 kali. Padahal penggunaan pestisida secara berlebihan tidak dianjurkan dalam berusahatani. Namun, petani terpaksa melakukan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membasmi hama wereng yang telah merusak padi mereka. Menurut Saptana, dkk (2013) menyatakan bahwa perbaikan teknik usahatani melalui penyuluhan pertanian ditujukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengembangan pertanian secara lebih baik (*better farming*), lebih menguntungkan (*better business*), lebih sejahtera (*better living*), dan lebih sehat (*better environment*). Orazem *et. al* (1988) juga berpendapat bahwa petani berharap memiliki keterampilan yang lebih terhadap teknik usahatani agar dapat melakukan usahatani dengan sangat baik.

Sedangkan pada kebijakan pembangunan irigasi, petani di Desa Malasan tidak begitu mempermasalahkan mengenai irigasi yang ada di Desa Malasan. Sistem irigasi di desa Malasan sudah berjalan dengan baik. Menurut data BPS pada tahun 2015, HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) intensifikasi khusus untuk irigasi di Desa Malasan sebesar 286 ha. Pada tahun 2016 dan 2017 terdapat sebanyak 288 ha intensifikasi khusus untuk irigasi di Desa Malasan yang sekaligus menjadi kawasan terbesar dibandingkan dengan desa lainnya di Kabupaten Trenggalek. Telah terjadi penambahan intensifikasi khusus untuk irigasi sebesar 2 ha dalam kurun waktu setahun dari tahun 2015 ke tahun 2016. Hal ini menandakan bahwa irigasi di Desa Malasan sudah berjalan baik dengan adanya peningkatan area irigasi tersebut. Menurut seluruh responden penelitian, ketersediaan air untuk irigasi sudah sangat memenuhi dalam usahatani. Sehingga petani beranggapan bahwa pembangunan irigasi tidak begitu dipermasalahkan karena dapat memenuhi kebutuhan petani dengan baik. Hal ini juga terbukti pada keadaan irigasi yang tertata dengan baik dan keadaan air yang bebas dari pencemaran air di lokasi penelitian. Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan melalui pengembangan sumberdaya air, pengembangan jaringan irigasi, pembangunan embung dan dam parit serta pengembangan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air. Tata kelola sumberdaya air diarahkan melalui pengembangan dan pengelolaan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan air untuk berbagai kebutuhan, pengendalian daya rusak air, pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan sistem data dan informasi sumberdaya air yang ditujukan untuk mewujudkan kemanfaatan sumberdaya air yang berkelanjutan. Kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan air baku secara berkelanjutan adalah: a) peningkatan fungsi dan rehabilitasi jaringan irigasi; b) optimalisasi kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastuktur irigasi; c) peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun namun belum berfungsi baik khususnya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap; d) rehabilitasi pada areal irigasi yang mengalami kerusakan padadaerah-daerah andalan penghasil padi serta meningkatkan efisiensi irigasi dengan perbaikan saluran irigasi, e) pengembangan sistem irigasi hemat air (Renstra, 2015).

Pada perbaikan teknik usahatani melalui demoplot, petani tidak memahami dengan baik tentang keuntungan yang didapat dari adanya demoplot. Kebanyakan petani tidak percaya akan hasil yang didapat dari lahan percontohan yang telah dibuat. Petani yang mau mengikuti perbaikan teknik usahatani melalui demoplot sebagian besar adalah ketua kelompok tani itu sendiri. Petani berasumsi bahwa hasil dari lahan percontohan hanya menghabiskan waktu dalam berusahatani dan beresiko tinggi dalam kegagalan berusahatani. Sebagian besar petani baru akan percaya jika hasil yang didapat dari lahan percontohan tersebut dikatakan berhasil. Namun, selama ini banyak kegagalan yang didapat dari adanya demoplot tersebut. Pada tahun 2010 pernah dilakukan lahan percontohan untuk percobaan varietas baru jenis Mentik tetapi hasil yang didapatkan tidak maksimal dan biaya yang dikeluarkan juga lebih besar dari varietas biasanya. Padahal jika demoplot dijalankan dengan baik maka dapat meningkatkan kemampuan seperti perubahan sikap petani terhadap penyerapan dan penerapan teknologi demoplot tersebut pada tanaman padi sawah. Untuk itu dibutuhkan perbaikan melalui penyuluhan terlebih dahulu agar petani memahami keuntungan yang didapatkan dalam perbaikan usahatani melalui demoplot jika dijalankan dengan baik. Menurut Lesmana dan Wulandari (2010) demonstrasi plot (demoplot) dapat merubah perilaku pemikiran petani dalam melakukan usaha taninya secara tradisional dan belum menerapkan teknologi pertanian yang baik dan benar, setelah adanya demoplot petani diharapkan memberikan perbaikan produksi, memperbaiki mutu gabah padi sawah dan pengenalan teknologi baru.



Sumber : Data Primer Tahun 2018

Gambar 4. Nilai Kegunaan (*Utility*) Atribut Aspek Teknis Produksi

5.3.2 Nilai Kegunaan (*Utility*) Atribut Aspek Ekonomi Produksi

Tabel 10. Nilai Kegunaan (*Utility*) Atribut Aspek Ekonomi Produksi

Level Atribut Aspek Ekonomi Produksi	<i>Utility Estimate</i>	<i>Std. Error</i>
Bantuan Kredit Usahatani	-.897	.005
Kebijakan Harga Pupuk	.642	.005
Kebijakan Harga Hasil Pertanian	.255	.005

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Pada Tabel 10 dapat diketahui bahwa kebijakan pertanian pada aspek ekonomi produksi yang paling diinginkan petani adalah kebijakan harga pupuk dengan nilai kegunaan sebesar 0,642. Urutan kedua yaitu kebijakan harga hasil pertanian dengan nilai kegunaan sebesar 0,255. Sedangkan urutan terakhir yaitu kebijakan bantuan kredit usahatani dengan nilai kegunaan sebesar -0,897. Petani lebih menginginkan kebijakan harga pupuk daripada kebijakan harga hasil pertanian dan kebijakan bantuan kredit usahatani.

Petani padi membutuhkan kepastian harga pupuk agar biaya total usahatani menjadi pasti (tidak fluktuatif). Apabila biaya faktor produksi tidak stabil, maka petani juga mengalami ketidakstabilan dalam penerimaan hasil panen. Kebijakan harga pupuk bertujuan sekaligus untuk meminimalisir kerugian pasca panen dan optimalisasi pendapatan akhir. Petani padi di Desa Malasan sangat mengeluhkan

harga pupuk yang ada saat ini. Ketersediaan pupuk juga tidak merata dan tidak tersedia dengan tepat waktu. Hal ini yang membuat harga pupuk yang ada di pasaran dapat melonjak jauh. Sebenarnya petani telah mendapatkan subsidi pupuk dari pemerintah, akan tetapi ketersediaan pupuk dirasa tidak mencukupi kebutuhan pupuk petani Padi. Sehingga petani membeli pupuk di pasaran dengan harga yang tidak menentu. Petani padi di Desa Malasan sangat menginginkan kebijakan mengenai harga pupuk agar harga dapat stabil dan ketersediaan pupuk memenuhi secara merata. Seperti yang telah dijelaskan pada aspek ekonomi produksi, harga pupuk antara subsidi dan non subsidi mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Perbedaan harga pupuk bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari harga normal pupuk subsidi sebesar Rp. 2.000 per kg bisa mencapai hingga Rp. 5.000 per kg. Hal tersebut menyebabkan 60% dari responden terpaksa harus membeli pupuk non subsidi untuk memenuhi kebutuhan pemupukan. Apalagi jika terjadi keterlambatan datangnya pupuk subsidi sedangkan petani sudah waktunya melakukan pemupukan maka petani terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga yang mahal. Seluruh responden sering mengeluhkan keterlambatan pupuk subsidi yang menyebabkan petani tidak bisa melakukan pemupukan tepat waktu.

Menurut Orazemet. *al* (1988) menyatakan bahwa petani cenderung lebih menginginkan kebijakan yang memberikan keuntungan secara nyata dengan waktu yang relatif cepat seperti kebijakan yang dapat meminimalkan biaya usahatani. Bekele (2007) juga berpendapat bahwa petani lebih memilih kebijakan yang memperbaiki harga input pertanian. Bekele menambahkan bahwa informasi harga pasar yang kurang memadai akan berdampak pada kegagalan pemasaran yang tidak efisien. Darwis dan Nurmanaf (2004) berpendapat bahwa sistem distribusi pupuk yang tidak berjalan menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk, sehingga petani harus membeli pupuk dengan harga lebih mahal. Alasan lain dikemukakan oleh Kariyasa dan Yusdja (2005) bahwa pemakaian pupuk urea di tingkat petani melebihi dosis anjuran. Kariyasa *et. al* (2004) menyebutkan upaya pemerintah melindungi petani melalui kebijakan subsidi pupuk belum bisa berjalan seperti yang diharapkan, yang terbukti masih seringnya terjadi fenomena lonjakan harga dan kelangkaan pupuk di tingkat petani. Petani kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, baik urea, SP-36, ZA, dan NPK dan diikuti dengan

harga pupuk yang sulit terjangkau. Kondisi tersebut menyebabkan harga pupuk lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. Harapan petani terhadap pemerintah adalah stabilisasi harga pupuk agar tidak melonjak naik di tingkat petani. Pada penelitian ini menghasilkan preferensi yang sesuai dengan pendapat penelitian terdahulu bahwa kebijakan harga pupuk cenderung lebih diinginkan oleh petani untuk menekan biaya usahatani sehingga dapat meningkatkan keuntungan usahatani.

Permasalahan diatas sependapat dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019. Beberapa permasalahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi adalah pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang belum valid, di mana terdapat indikasi penggelembungan (*mark-up*) luas lahan dan jumlah petani. Pada aspek penyaluran/distribusi, penjualan pupuk dengan harga di atas HET, penjualan pupuk kepada petani yang tidak terdaftar dalam RDKK, tidak dipasangnya spanduk pengumuman harga, penyaluran pupuk yang tidak sesuai dengan DO (*Delivery Order*), keterlambatan distribusi, kelangkaan, penggantian kemasan, penimbunan, penjualan di luar wilayah distribusi, dan terdapat pengecer yang tidak resmi. Sedangkan terkait aspek pengawasan, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) di tingkat provinsi maupun kabupaten belum menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Mereka dinilai tidak memahami sepenuhnya tugas dan fungsinya, tidak membuat laporan pengawasan, serta kurangnya dana untuk melakukan pengawasan. Namun, dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata menjadikan pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.

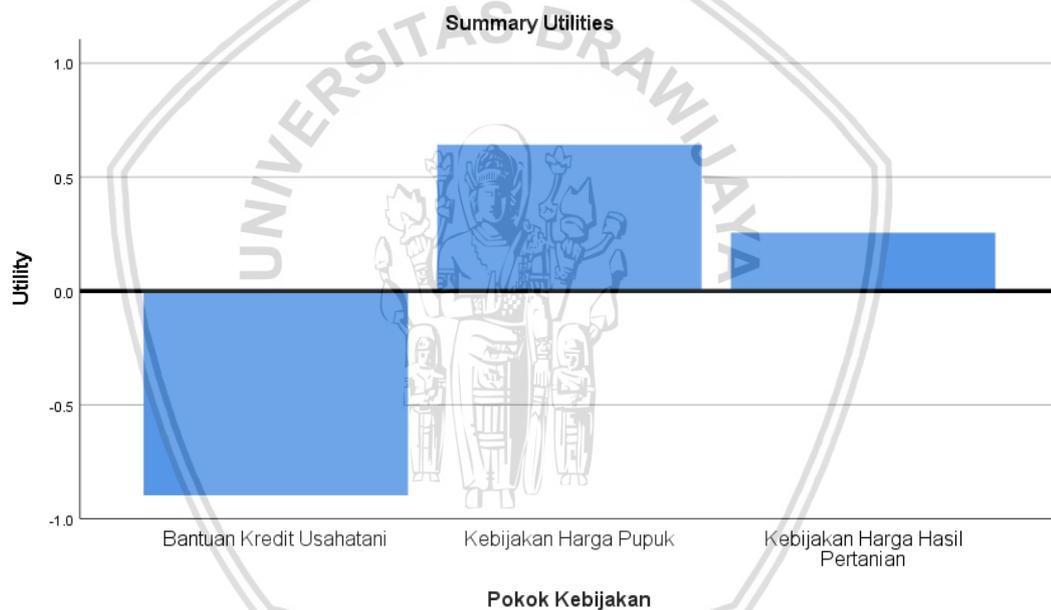
Pada kebijakan harga hasil pertanian juga dibutuhkan oleh petani. Petani menginginkan harga hasil pertanian yang dapat memberikan keuntungan maksimal dari usahatani. Namun pemerintah telah menetapkan kebijakan harga atap dan harga dasar untuk komoditas pertanian. Petani tidak begitu mempermasalahkan tentang harga yang telah ditetapkan selama harga masih cenderung stabil dan tidak merugikan petani. Sebagian besar responden menjual hasil panen kepada para pemborong yang sebelumnya sudah bekerjasama dengan petani. Namun, ada juga petani yang menjual hasil panennya ke pasar terdekat

melalui tengkulak ataupun ke konsumen secara langsung. Harga beras di daerah Trenggalek mencapai dikisaran Rp. 9.000 sampai dengan Rp. 11.000 tergantung kualitas beras (BPS, 2017). Harga beras yang didapatkan oleh responden di Desa Malasan sebesar Rp. 10.000 pada musim panen bulan Desember 2017. Hal ini terjadi karena adanya fungsi pemasaran yang terjadi di Desa Malasan. Harga merupakan salah satu indikator kinerja pasar, termasuk pada komoditas pertanian. Kementerian Perdagangan sebagai instansi pemerintah memiliki peran yang penting dalam menciptakan iklim perdagangan komoditas pertanian yang efisien dan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen. Renstra tahun 2010 – 2014 disebutkan bahwa stabilisasi harga merupakan salah satu sasaran kerja Kementerian dan harga merupakan indikator penentuan kebijakan. Kebijakan harga merupakan salah satu langkah yang diambil ketika harga yang terbentuk di pasar tidak berada dalam kondisi normal akibat kegagalan pasar.

Berbeda halnya dengan kebijakan bantuan kredit usahatani. Petani padi di Desa Malasan kurang menginginkan adanya kebijakan tersebut. Hampir semua dari 50 responden tidak ada yang mengambil sistem kredit usahatani. Hal ini dikarenakan petani tidak ingin mengambil resiko tinggi dalam berusahatani di skala yang besar. Kebanyakan petani mengusahakan lahannya sesuai dengan modal yang dimiliki. Hanya petani yang mempunyai lahan sangat luas, berani melakukan peminjaman untuk berusahatani. Biasanya petani meminta bantuan kredit usahatani melalui bank. Namun, tidak banyak petani yang mau melakukan kredit usahatani dikarenakan prosedur yang tidak mudah dan persyaratan yang tidak sedikit. Berbagai persyaratan untuk memperoleh kredit juga dipersulit, seperti administrasi yang berbelit-belit sehingga menyebabkan petani kurang menginginkan kebijakan bantuan kredit usahatani. Luas lahan yang dimiliki petani juga tidak begitu besar yang artinya tidak membutuhkan biaya yang sangat besar.

Selain itu, kebijakan-kebijakan pertanian semacam itu tidak mengajari para petani mengenai strategi yang tepat untuk mengelola dan mengembangkan pertanian. Kebijakan tersebut hanya mengajari petani menjadi seorang manajer seperti bagaimana mengelola kegiatan simpan pinjam yang baik, bagaimana mengembangkan dana bergulir dan sebagainya. Padahal, aspek penting yang sebenarnya dibutuhkan oleh petani adalah kemampuan untuk mengelola pertanian

beserta produk yang dihasilkan. Seperti yang disampaikan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 yaitu skema kredit tersebut belum mampu mengatasi permodalan petani dan dukungan perbankan belum memberikan kontribusi yang optimal bagi petani. Hal ini disebabkan antara lain sumber dana sepenuhnya dari bank dan risiko ditanggung bank, oleh karena itu perbankan menerapkan prudential perbankan. Dampak dari penerapan prudential perbankan dirasakan petani seperti sulitnya akses permodalan, persyaratan yang dianggap rumit dan waktu yang lama, masih diperlukan jaminan tambahan yang memberatkan petani berupa sertifikat lahan, terbatasnya sosialisasi dan informasi keberadaan skema kredit serta terbatasnya pendampingan dan pengawalan petani yang membutuhkan permodalan dari perbankan.



Sumber : Data Primer Tahun 2018

Gambar 5. Nilai Kegunaan (*Utility*) Atribut Aspek Ekonomi Produksi

5.3.3 Nilai Kegunaan (*Utility*) Atribut Aspek Kelembagaan Petani

Tabel 11. Nilai Kegunaan (*Utility*) Atribut Aspek Kelembagaan Petani

Level Atribut Aspek Kelembagaan Petani	<i>Utility Estimate</i>	<i>Std. Error</i>
Penguatan Kelembagaan Petani	.457	.005
Pengembangan Pertanian Kawasan	.413	.005
Pengembangan Koperasi Tani	-.870	.005

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Pada Tabel 11 dapat diketahui bahwa kebijakan pertanian pada aspek kelembagaan petani yang paling diinginkan petani adalah kebijakan penguatan kelembagaan petani dengan nilai kegunaan sebesar 0,457. Urutan kedua yaitu kebijakan pengembangan pertanian kawasan dengan nilai kegunaan sebesar 0,413. Pada urutan terakhir yaitu kebijakan pengembangan koperasi tani dengan nilai kegunaan sebesar -0,870.

Berdasarkan kondisi yang ada di lapang, petani padi di Desa Malasan aktif melakukan kegiatan di kelompok tani. Kelompok tani di desa Malasan sering mengadakan pertemuan dengan anggota kelompok tani serta dengan kelompok tani lainnya untuk saling bertukar pendapat tentang kegiatan usahatani. Hal ini terbukti dengan menangnya desa Malasan sebagai desa yang saling bergotong royong khususnya dalam bidang pertanian. Petani padi di Desa Malasan mendukung penguatan kelembagaan petani agar koordinasi dan kegiatan pendukung lainnya bisa berjalan dengan efektif. Pada tahun 2016, terdapat sebanyak 5 kali kontak tani dengan penyuluh lapang, 5 kali perkumpulan SLPHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu), dan 5 kali perkumpulan gabungan kelompok tani di Desa Malasan (BPS, 2017). Kontak tani dengan penyuluh tersebut sudah termasuk dalam batas kurun waktu yang normal dilakukan dalam setahun untuk melakukan penyuluhan. Bapak Sumarin selaku ketua kelompok tani "Makmur" di Dusun Lothekol, Desa Malasan melakukan pertemuan rutin dengan anggota kelompok taninya sebanyak 1 kali dalam sebulan.

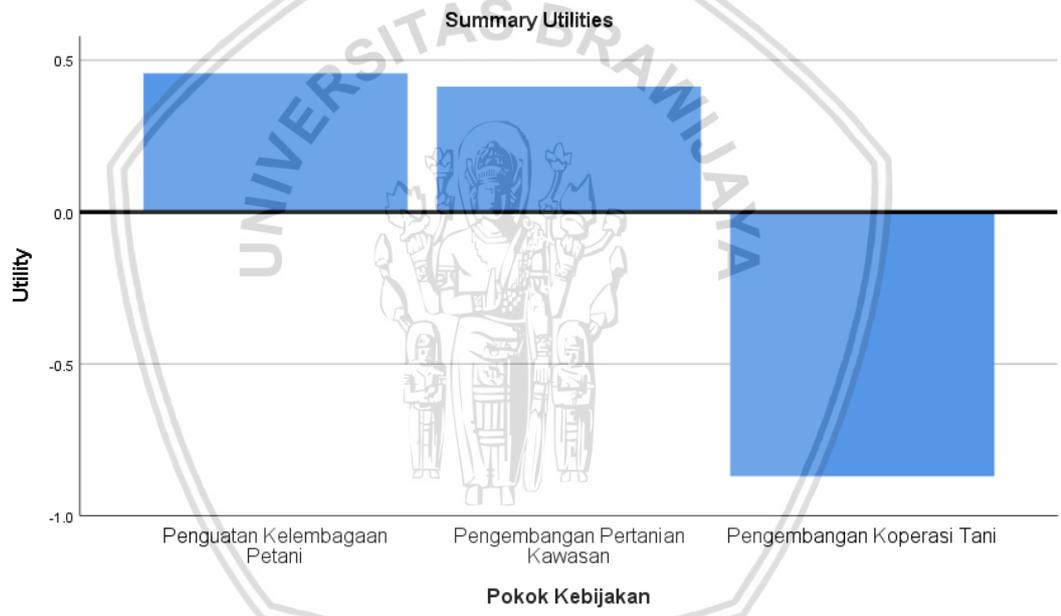
Melalui penguatan kelembagaan petani juga dapat mempermudah penyaluran informasi yang *up to date* berkaitan dengan usahatani. Adanya informasi yang *up to date* akan menjadikan petani lebih maju dan tidak tertinggal dengan kemajuan informasi dan teknologi yang ada. Petani lebih menginginkan kebijakan penguatan kelembagaan petani daripada kebijakan pengembangan pertanian kawasan dan kebijakan pengembangan koperasi tani. Petani padi di Desa Malasan membutuhkan penguatan kelembagaan petani agar pengetahuan dan informasi mengenai usahatani dapat tersampaikan kepada seluruh petani dengan baik. Jika kelembagaan petani kuat maka kegiatan usahatani dapat berjalan dengan efektif. Menurut Saptana, dkk (2013) menyatakan bahwa penguatan peran dan fungsi yang dapat dilakukan pada masing-masing unit usaha

untuk meningkatkan kinerja kelembagaan petani, baik dari aspek manajemen, permodalan, kegiatan usaha, dan meningkatkan partisipasi anggota.

Di sisi lain, pengembangan pertanian kawasan di Desa Malasan telah berjalan dengan baik. Desa Malasan telah menjadi sentra pertanian padi terbesar di Kabupaten Trenggalek. Hal ini terbukti bahwa menyumbang PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terbesar di Trenggalek pada tahun 2015 sebesar 31,21% dengan PDRB Kabupaten Trenggalek didominasi oleh Sektor Pertanian (BPS, 2016). Desa Malasan merupakan desa dengan penyumbang PDRB terbesar pertama dalam sektor pertanian pangan berupa tanaman padi di Kabupaten Trenggalek. Kawasan pertanian di Desa Malasan sudah terkonsentrasi berdasarkan komoditas yang ditanam. Lokasi pertanian terkumpul menjadi satu area pertanian telah membuktikan bahwa pengembangan pertanian kawasan sudah berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 bahwa kawasan pertanian merupakan gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi dan manajemen pembangunan di wilayah serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya dan keberadaan infrastruktur penunjang. Pengembangan kawasan pertanian dimaksudkan untuk menjamin ketahanan pangan nasional, pengembangan dan penyediaan bahan baku bioindustri, serta penyediaan bahan bakar nabati melalui peningkatan produksi pertanian secara berkelanjutan, berdaya saing dan mampu mensejahterakan semua pelaku usaha yang terlibat di dalamnya secara berkeadilan. Pengembangan kawasan pertanian dalam operasionalnya harus disesuaikan dengan potensi agroekosistem, infrastruktur, kelembagaan sosial ekonomi mandiri dan ketentuan tata wilayah.

Sedangkan untuk pengembangan koperasi tani, kebijakan ini kurang diinginkan petani padi di Desa Malasan. Koperasi tani yang ada di Desa Malasan kurang berjalan secara maksimal. Menurut data BPS (2017), hanya terdapat 1 kios KUD yang menyediakan berbagai kebutuhan usahatani seperti modal, benih, pupuk, pestisida, dan sebagainya di Kecamatan Durenan pada tahun 2012-2016. Sedangkan kios non KUD terdapat 10 kios pada tahun 2016. Manfaat adanya kios KUD yaitu untuk membantu petani dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Hanya perangkat desa yang memanfaatkan sarana yang ada, banyak petani yang

kurang memahami tentang keuntungan adanya koperasi tani. Sudah adanya wadah untuk memenuhi kebutuhan petani, namun petani Desa Malasan tidak begitu menginginkan adanya koperasi tani tersebut. Koperasi tani yang diharapkan berfungsi sebagai wadah kelompok tani kurang berjalan secara optimal. Dalam kenyataannya, koperasi tani lebih bersifat sebagai suatu badan usaha yang anggota dan pengurusnya cenderung eksklusif dan tidak mewadahi kelompok tani. Petani kurang memanfaatkan wadah yang tersedia untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini sependapat dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 yang mengatakan bahwa koordinasi dan kinerja lembaga keuangan perbankan perdesaan masih rendah. Koperasi perdesaan yang bergerak di sektor pertanian juga masih belum berjalan optimum.



Sumber : Data Primer Tahun 2018

Gambar 6. Nilai Kegunaan (*Utility*) Atribut Aspek Kelembagaan Petani

5.3.4 Kombinasi Level Atribut yang Paling Diinginkan Petani

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis konjoin, dapat diketahui kombinasi level atribut yang paling diinginkan oleh petani. Petani padi Desa Malasan lebih menginginkan kebijakan pada aspek teknis produksi yaitu kebijakan perbaikan teknik usahatani melalui penyuluhan. Kemudian pada aspek ekonomi produksi, petani lebih menginginkan kebijakan harga pupuk. Pada aspek kelembagaan petani ternyata lebih menginginkan kebijakan penguatan



kelembagaan petani. Sehingga kombinasi kebijakan pertanian yang lebih diinginkan petani padi di Desa Malasan ini adalah kebijakan perbaikan teknik usahatani melalui penyuluhan, kebijakan harga pupuk, dan kebijakan penguatan kelembagaan petani. Menurut Bekele (2007) meskipun penelitian dibuat untuk area kecil, kerangka penelitian dapat digunakan sebagai instrumen untuk analisis preferensi dalam skala daerah yang lebih besar dan hasil tertentu bisa berlaku untuk daerah dengan kebijakan dan fenomena yang sama.

5.3.5 Korelasi *Pearson's R* dan *Kendall's tau*

Uji ketepatan prediksi terhadap hasil konjoin merupakan proses pengujian untuk mengetahui apakah prediksi yang telah dilakukan mempunyai ketepatan yang tinggi. Pada uji ketepatan prediksi ini, akan dilakukan pengukuran output korelasi secara *Pearson's R* dan *Kendall's tau*. Pengukuran tersebut akan diketahui seberapa kuat hubungan antara *estimates* dan *actual* atau seberapa tinggi *predictive accuracy*. Hasil korelasi yang didapatkan dari pemanfaatan SPSS 25 dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Korelasi *Pearson's R* dan *Kendall's tau*

	Correlations ^a	
	Value	Sig.
<i>Pearson's R</i>	1.000	.000
<i>Kendall's tau</i>	.983	.000

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Pada Tabel 12 dapat diketahui bahwa dari hasil korelasi yang diperoleh melalui pemanfaatan SPSS 25 didapatkan nilai korelasi baik *Pearson's R* maupun *Kendall's tau* menghasilkan angka yang tinggi yaitu diatas 0,05. *Pearson's R* dan *Kendall's tau* terhadap utilitas (Y) dengan utilitas aktual U(x), saling berkorelasi positif dengan nilai *Pearson's R* yaitu 1 dan nilai *Kendall's tau* yaitu 0,983. Nilai tersebut merupakan nilai yang digunakan untuk menyatakan tingkat korelasi instrument kuesioner secara keseluruhan pada hubungan preferensi (skala likert) dan atribut.

Menurut Sugiyono (2011) bahwa dalam pedoman untuk memberikan interpretasi pada korelasi antara nilai 0,80 hingga 1,000 menunjukkan angka korelasi yang sangat kuat dalam menunjukkan hubungan antara preferensi dengan data yang didapatkan. Korelasi *Pearson's R* dan *Kendall's tau* diatas 0,05 yang

berarti bahwa adanya korelasi nyata antara hasil konjoin dengan pendapat petani maka hal ini dapat dikatakan sangat baik. Sedangkan pada uji signifikansi korelasi diatas menghasilkan signifikansi 0,000 yang berarti bahwa nilai ini di bawah 0,05 maka korelasi tersebut mempunyai signifikansi yang sangat kuat. Taraf signifikansi di atas 0,05 menunjukkan bahwa pendapat petani dapat diterima untuk menggambarkan preferensi petani padi terhadap kebijakan pertanian.

Menurut Hair, *et al* (2006) berpendapat bahwa semakin tinggi korelasinya maka semakin cocok atau semakin baik modelnya. Untuk data ranking dilihat korelasi antara ranking aktual dan prediksi dengan *Kendall's tau*, sedangkan untuk data skor digunakan korelasi *Pearson's R*. Penelitian ini pada proses pengolahan datanya menggunakan skor atau *skala likert* maka nilai *Kendall's tau* tidak diperhitungkan. Hair, *et al* (2006) menambahkan bahwa analisis konjoin terbebas dari asumsi-asumsi seperti uji normalitas, homoskedastisitas dan sebagainya. Desain yang optimal merupakan desain orthogonal (tidak terdapat korelasi diantara level-level antar atribut) dan *balanced* (setiap level dalam suatu faktor muncul dalam jumlah yang sama). Pada korelasi *Pearson's R* didapatkan hasil yang sempurna yaitu 1 karena responden bersifat homogen sehingga pola pikir responden yang bersifat homogen ini akan mempengaruhi jawaban dari responden yang cenderung sama.

VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis preferensi petani terhadap kebijakan pertanian di Desa Malasan Kabupaten Trenggalek dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik umum petani padi Desa Malasan mayoritas berjenis kelamin laki-laki dengan dominan usia petani produktif, pendidikan terakhir paling banyak tamatan SMA, dan luas lahan usahatani mayoritas dibawah 1 ha.
2. Hasil analisis konjoin menunjukkan nilai kepentingan atribut kebijakan terpenting adalah aspek teknis produksi yaitu sebesar 37,45%, aspek ekonomi produksi yaitu sebesar 33,41%, dan aspek kelembagaan petani yaitu sebesar 29,14%. Kebijakan yang paling diinginkan petani padi Desa Malasan pada aspek teknis produksi (kebijakan perbaikan teknik usahatani melalui penyuluhan), aspek ekonomi produksi (kebijakan harga pupuk), dan aspek kelembagaan petani (kebijakan penguatan kelembagaan petani).
3. Kombinasi kebijakan pertanian yang paling diinginkan petani padi di Desa Malasan yaitu kebijakan perbaikan teknik usahatani melalui penyuluhan, kebijakan harga pupuk, dan kebijakan penguatan kelembagaan petani.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang diperoleh, maka kebijakan pertanian di Desa Malasan sebaiknya melakukan perbaikan dalam aspek teknis produksi dengan kombinasi kebijakan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan petani padi di Desa Malasan yaitu kebijakan perbaikan teknik usahatani melalui penguatan kelembagaan petani (penyuluhan) dan kebijakan harga pupuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaker DA, Kumar V, Day GS. 2003. *Marketing Research*. 8th ed. (US): John Wiley & Sons.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Trenggalek dalam Angka*. Penerbit KantorBPS Kabupaten Trenggalek.
- _____. *Kecamatan Durenan dalam Angka*. Penerbit KantorBPS Kabupaten Trenggalek.
- _____. 2017. *Kabupaten Trenggalek dalam Angka*. Penerbit KantorBPS Kabupaten Trenggalek.
- _____. *Kecamatan Durenan dalam Angka*. Penerbit KantorBPS Kabupaten Trenggalek.
- Bekele, Wagayehu. 2007. *Farmers' Preferences for Development Intervention Programs: A Case Study of Subsistence Farmers from East Ethiopian Highlands*. International Conference on African Development Archives. Paper 124.
- Christina P. Parel, et al. 1973. *Sampling Design and Procedures*. New York: ADC.
- Chruchill GA. 2005. *Dasar-dasar Riset Pemasaran*. Edisi ke-4 Jilid 1. Andrianti, Yahya DDK, Salim E, penerjemah. Saat S, Kristiaji WC, editor. Jakarta (ID): Erlangga. Terjemahan dari: Basic Marketing Research, Fourth Edition.
- Darwis, V. dan A. R Nurmanaf. 2004. *Kebijakan Distribusi, Tingkat Harga, dan Penggunaan Pupuk di Tingkat Petani*. Forum Pengkajian Agro Ekonomi. Volume 22, No 1, Juli 2004. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Pengkajian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Gustafsson, A., et al. 2007. *Conjoint Measurement methodes and Applications*. Fourth Editions. Springer Verlage. Berlin.
- Hair JF, William C. Black, Barry J, Babin, Rolph, Anderson E, Tatham RL. 2006. *Multivariate Data Analysis*, Sixth Edition. Pearson Education Inc. New Jersey.
- Hariato. 2010. *Kerangka Konsep Tahapan Pembangunan Agribisnis*. Refleksi Agribisnis: 65 Tahun Profesor Bungaran Saragih. IPB Press. Bogor.
- _____. 2013. *Percepatan Pencapaian Surplus Beras 10 Juta Ton*. www.setkab.go.id/artikel. Diakses pada 3 Desember 2017.

- Hayami, Y. and V. Ruttan. 1985. *Agricultural Development. An International Perspective*. John Hopkins University Press. Baltimore and London.
- Hinson RA, Bruchhaus MN. 2008. *Consumer Preferences for Locally Produced Starwberries*. J Food Distrib. Res. 39(3):1-4.
- K. Mittenzwei, Stefan M., Karen R., and Valborg K. 2015. *Hot cognition in agricultural policy preferences in Norway?*. Journal of Agriculture and Human Values. Norwegian Institute for Bioeconomy Research. Postboks 8024 Dep. NO-0030 OSLO. Norway.
- Kabede TA. 2001. *Farm Household Technical Efficiency*. A stochastic Frontier Analysis. A study of Rive Produvtion in Mardi Watershed in the Western Development Region of Nepal Master Thesis, Departemen of Economics and Social Sciencer Agricultural University of Norway, Norway. <http://www.ub.no/elpub/NORAD/2001/NLH/Thesis.pdf>.
- Kariyasa, K. dan Y.Yusdja. 2005. *Evaluasi Kebijakan Sistem Distribusi Pupuk Urea di Indonesia: Kasus Provinsi Jawa Barat*. Analisis Kebijakan Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor. 3(3): 201-216.
- Kariyasa, K., M. Maulana, dan S. Murdianto. 2004. *Usulan Tingkat Subsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang Relevan serta Perbaikan Pola Pendistribusian Pupuk di Indonesia*. Analisis Kebijakan Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor. 2(3): 277-287.
- Kementan. 2009. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014*. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- _____. 2010. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 (Permentan Nomor 15 Tahun 2011)*. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- _____. 2013. *Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013-2045*. Biro Perencanaan. Jakarta.
- _____. 2015. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019*. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Krisnamurthi, B. 2006. *Revitalisasi Pertanian: Sebuah Konsekuensi Sejarah dan Tuntutan Masa Depan*. Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Kusumawati N., Sasongko L. A., Prabowo R. 2015. *Preferensi Petani Terhadap Sistem Tanam Padi Jajar Legowo*. Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian. Mediagro Vol. 11 No. 1 Hal. 75-91.

- Lee, J.E. 1994. *Transparency, Empowerment and Public Interest: A View on the Role of Public Employed Agricultural Economists*. American Journal of Agricultural Economics 76(5):1010-1021.
- Lesmana, D., Wulandari, S. 2010. *Efektivitas Penggunaan Demonstrasi Plot Padi Sawah (Oryza Sativa L.) Terhadap Tingkat Produksi Padi di Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*. Jurnal Agribisnis Mulawarman Samarinda. EPP. Vol.7 No.2. 2010:37-42.
- Mattjik AA, Sumertajaya IM. 2011. *Sidik Peubah Ganda: dengan Menggunakan SAS*. Wibawa GNH, Hadi AP, editor. Bogor (ID): IPB Press.
- Muttaqin, Adhar. (28 Juli 2017). Detiknews. *Wereng Mewabah di Trenggalek, Puluhan Hektar Padi Gagal Panen*. <https://m.detik.com/news/jawatimur/3577186/wereng-mewabah-di-trenggalek-puluhan-hektar-padi-gagal-panen>.
- Orazem, Peter F, Otto, Daniel M, and Edelman, Mark A. 1988. *An Analysis of Farmers Agricultural Policy Preferences*. Iowa State University. Economic Staff Paper Series. 185.
- Ragasa, C., S.C. Babu and J. Ulimwengu. 2011. *Institutional and Capacity Challenges in Agricultural Policy Process*. IFPRI. Melbourne.
- Santoso S. 2010. *Statistika Multivariat*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Saptana, Iqbal M., dan Ar-Rozi A.M. 2013. *Evaluasi Kebijakan Tujuh Gema Revitalisasi dalam Pembangunan Pertanian*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 11, No. 2 (2013):107-127.
- Schupp A, Gillespie J, Prinyawiwatkul, W & Neil, CEO. 2003. *Consumer-preferred attributes of a fresh ground beef and Turkey product: A conjoint analysis*. J. Food Distrib. Res. Vol. 34. No. 2:46-52.
- Simatupang, P. 2003. *Analisis Kebijakan Pertanian Volume 1*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. No. 1, Maret 2003: 1-21.
- Simatupang, P., Maulana, M., dan Syafa'at, Nizwar. 2006. *Analisis Kendala Penawaran dan Kebijakan Revitalisasi Produksi Padi*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Jurnal Agro Ekonomi. Vol 24 No.2. Oktober 2006 : 207-230.
- Sudaryanto, T. dan IW. Rusastra. 2006. *Kebijakan Strategis Usaha Pertanian dalam Rangka Peningkatan Produksi dan Pengentasan Kemiskinan*. Jurnal Litbang Pertanian 25(4): 115-122.

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Suharjo, B. 2001. *New Product Development with Conjoint Analysis*. Jakarta : PT. Carpicorn MARS Indotama.
- Sumarwan, U. 2003. *Perilaku Konsumen, Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Syahfitriani, Tarigan G, Bangun P. 2013. *Aplikasi analisis konjoin untuk mengukur preferensi mahasiswa FMIPA USU dalam memilih produk pasta gigi*. Sainia Matematika Vol. 1, No. 1 (2013):63-71.
- Todaro, M.P. and S.C. Smith. 2014. *Economic Development*. Pearson Education Press. New York.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Vanderstoep, Scott W., dan Johnston, Deidre D. 2009. *Research Methods for Everyday Life*. United Kingdom: Jossey Bass Wiley.
- Zarkasi. Juni 2016. Gema Desa. *Desa Malasan-Kabupaten Trenggalek, Terbaik II Lomba Gotong Royong Jatim Jadikan Gotong Royong Tradisi Setiap Hari*. Majalah. Media Pemberdayaan Masyarakat. Edisi Juli 2016 09-11. Surabaya.